

# FOREST POSITIVE COALITION OF ACTION

## Laporan Lanskap Blueprint Komoditas Berkelanjutan

Mei 2025



Forest  
Positive



proforest

# Daftar Isi



Judul Topik:	Halaman
1. Lanskap Blueprint: Kerangka Kerja & Proses	3 – 7
2. Menerapkan Lanskap Blueprint pada Inisiatif Lanskap/Yurisdiksi di Indonesia	8 – 13
3. Hasil Analisa Lanskap Blueprint di Aceh Tamiang	14 – 24
4. Hasil Analisa Lanskap Blueprint di Siak	25 – 36
5. Hasil Analisa Lanskap Blueprint di Sintang	37 – 47
6. Pembelajaran dan Rekomendasi	48 – 56

# 1. Lanskap Blueprint: Kerangka Kerja & Proses

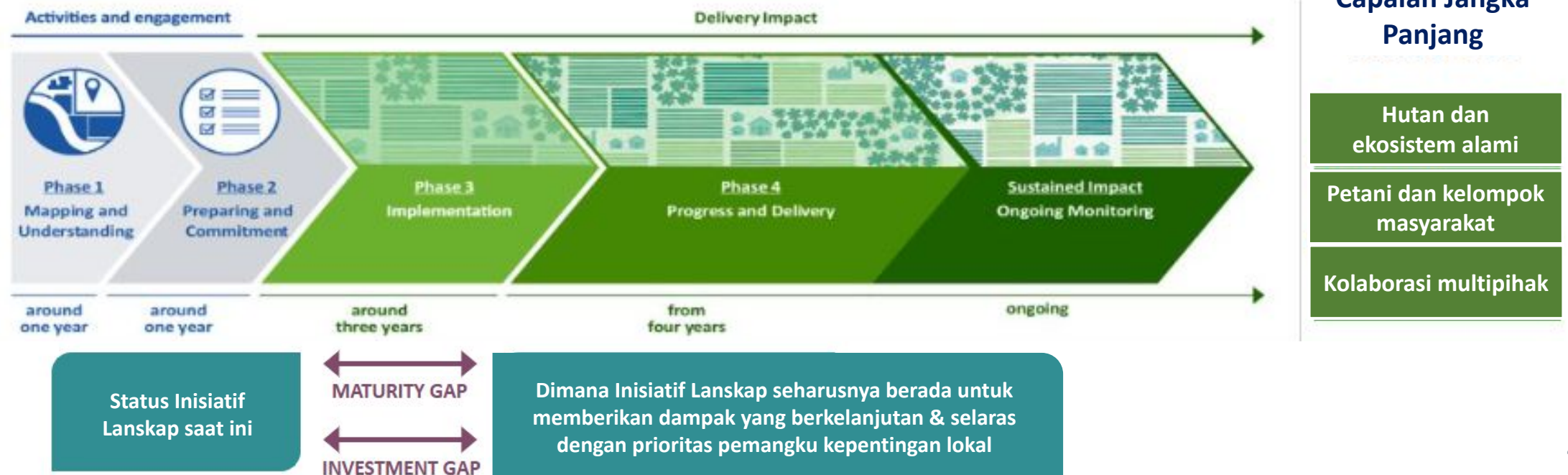


# Latar Belakang



Inisiatif Lanskap (bentang alam) dan Yurisdiksi adalah model yang efektif untuk mengatasi masalah sistemik dan mendorong dampak positif dalam skala besar pada lanskap produksi. Inisiatif Lanskap dan Yurisdiksi menyediakan sarana bagi sektor swasta untuk berkolaborasi dengan pemerintah daerah, masyarakat, dan para pihak terkait untuk memitigasi risiko pada rantai pasok yang tidak dapat diatasi oleh perusahaan secara mandiri, serta untuk harmonisasi kepentingan antara sektor swasta dan para pihak di tingkat tapak.

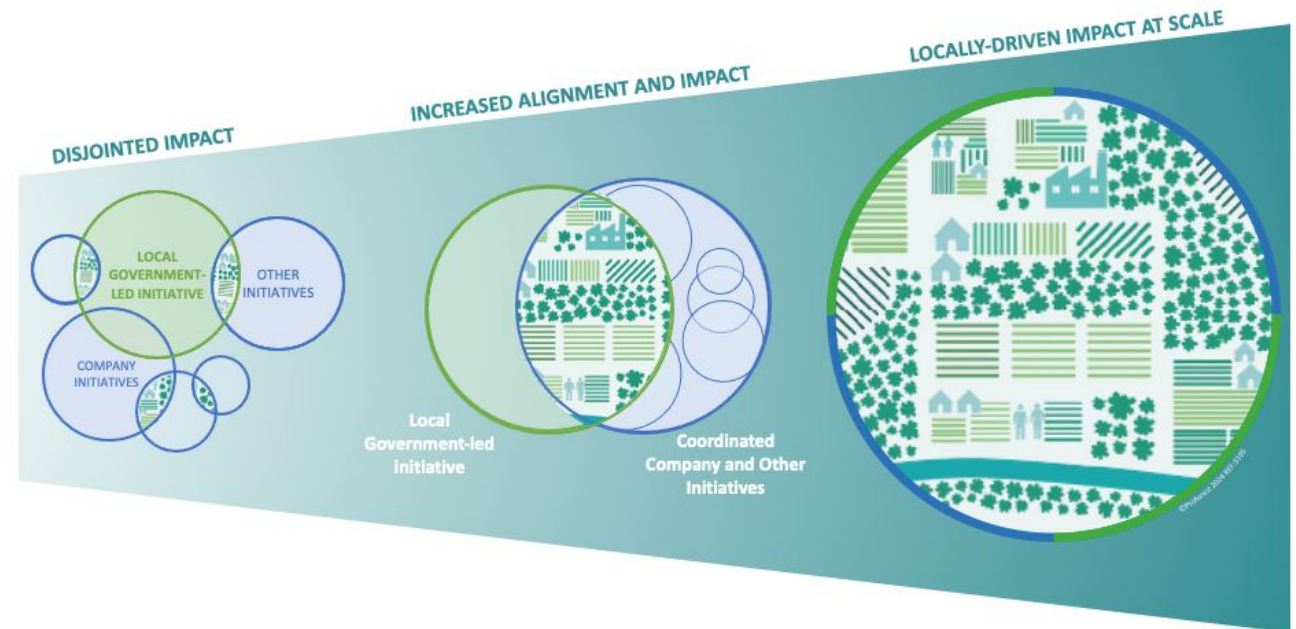
**Memperkuat keselarasan antar para pihak adalah kunci untuk menciptakan Inisiatif Lanskap dan Yurisdiksi dan Forum Multipihak yang matang dan siap investasi.**



# Kerangka Kerja dan Proses

Lanskap blueprint ini merupakan: 1) kerangka kerja yang diharapkan untuk mencapai inisiatif lanskap dan yurisdiksi yang matang dan 2) proses untuk menyatukan para pihak demi tercapainya visi lanskap yang selaras.

Komponen dan Tujuan Lanskap Blueprint	Sub-komponen
Forum & Tata Kelola Multi Pihak	Kepemimpinan
	Praktik kolaboratif
	Backbone engagement
	Pengukuran, pembelajaran, dan evaluasi
Rencana aksi	Lembaga tata kelola
	Komitmen keberlanjutan di tingkat kabupaten dan capaiannya
	Target dan kemajuan inisiatif lanskap yang didanai oleh sektor swasta
	Roadmap: Rencana aksi, di tingkat kabupaten dan inisiatif, untuk mencapai target
Pemantauan & pelaporan	Pengumpulan, Pengelolaan, dan Pemantauan Data
	Pelaporan dan Validasi
	Berbagi data dan platform yurisdiksi yang terintegrasi
Pendanaan & Strategi	Sumber dan mekanisme pendanaan
	Kesenjangan pendanaan untuk mencapai tujuan dan target



*Kerangka kerja blueprint divalidasi oleh para pihak melalui uji coba di Indonesia. Kerangka kerja ini konsisten dengan [Core Criteria for Mature Landscape Initiative](#) yang dikembangkan oleh ISEAL.*

*Proses bagi para pihak untuk menyelaraskan visi bersama dengan mempertimbangkan komponen-komponen di dalam kerangka kerja lanskap blueprint*

# Kerangka Kerja Blueprint di Lanskap Komoditas Berkelanjutan

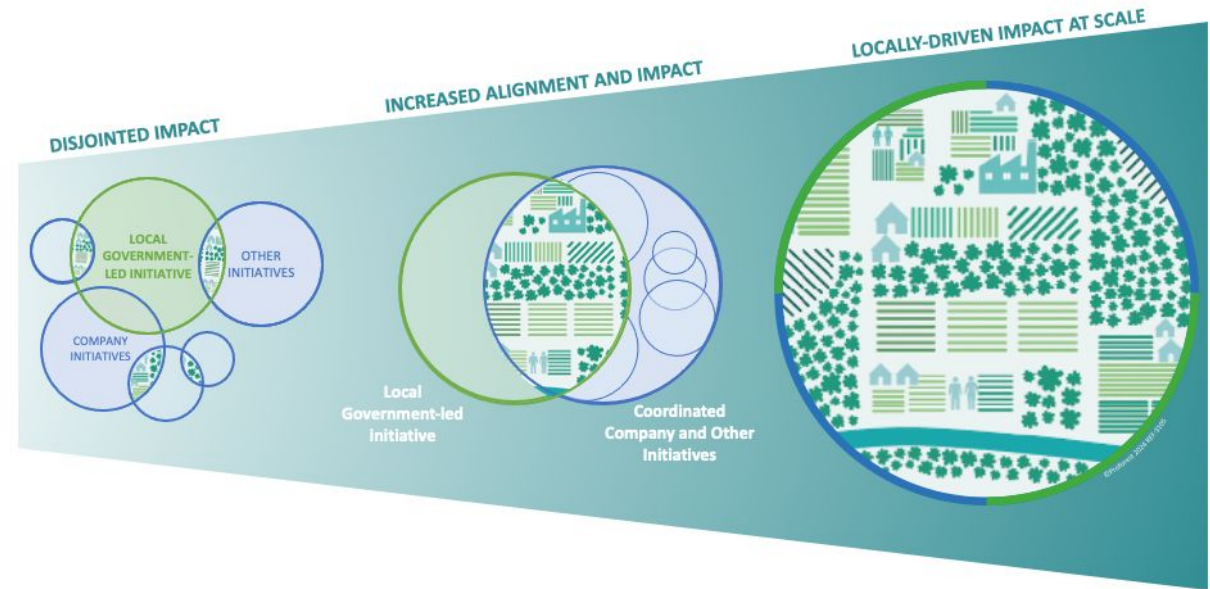
Kerangka kerja berikut ini telah diujicoba dengan para pihak di tingkat kabupaten di Indonesia. Komponen dan sub-komponen ini menunjukkan kriteria inisiatif lanskap atau yurisdiksi yang matang dan untuk identifikasi aspek yang masih diperlukan pengembangan. *Komponen yang dicetak **tebal** adalah kunci utama untuk integrasi yang lebih baik antara perspektif para pihak, terutama sektor swasta dan pemerintah daerah.*

Komponen dan Tujuan Lanskap Blueprint	Sub-komponen
<b>Forum &amp; Tata Kelola Multi Pihak</b> <i>Memahami kematangan forum dan koordinasi pada forum multi pihak di tingkat kabupaten</i>	Kepemimpinan
	<b>Praktik kolaboratif</b>
	<i>Backbone engagement</i>
	<b>Pengukuran, pembelajaran, dan evaluasi</b>
	Lembaga tata kelola
<b>Rencana aksi</b> <i>Memahami target dan capaian program pemerintah dan inisiatif lanskap</i>	<b>Komitmen keberlanjutan di tingkat kabupaten dan capaiannya</b>
	<b>Target dan kemajuan inisiatif lanskap yang didanai oleh sektor swasta</b>
	<b>Roadmap: Rencana aksi, di tingkat kabupaten dan inisiatif, untuk mencapai target</b>
<b>Pemantauan &amp; pelaporan</b> <i>Mengidentifikasi manajemen data dan struktur pelaporan di kabupaten, termasuk hubungan antara program pemerintah, inisiatif, dll.</i>	Pengumpulan, Pengelolaan, dan Pemantauan Data
	Pelaporan dan Validasi
	<b>Berbagi data dan platform yurisdiksi yang terintegrasi</b>
<b>Pendanaan &amp; Strategi</b> <i>Mengidentifikasi sumber pendanaan dan kesenjangan yang ada terhadap target di tingkat kabupaten atau target khusus inisiatif lanskap</i>	Sumber dan mekanisme pendanaan
	Kesenjangan pendanaan untuk mencapai tujuan dan target

# Hasil Analisis Lanskap Blueprint Komoditas Berkelanjutan

## Tujuan Jangka Pendek:

- Uji kriteria lanskap blueprint di tiga kabupaten di Indonesia, untuk mengidentifikasi tujuan pemerintah daerah dan inisiatif yang didanai oleh sektor swasta;
- Menggunakan kerangka kerja blueprint untuk memahami progress dan aspek yang masih perlu ditingkatkan agar inisiatif lanskap di tiga kabupaten mencapai keselarasan dan memiliki dampak yang lebih besar;
- Mendapatkan pembelajaran dan faktor kesuksesan inisiatif lanskap/yurisdiksi di tiga kabupaten uji coba.



## Tujuan Jangka Panjang:

Inisiatif lanskap dan yurisdiksi dapat memberikan dampak yang lebih besar melalui tujuan dan pendekatan yang selaras, yaitu melalui:

1. Membangun kapasitas forum multipihak terkait kebutuhan data dan pelaporan serta peluang investasi; dan
2. Memperkuat justifikasi bisnis untuk pihak swasta.

## 2. Menerapkan Lanskap Blueprint pada Inisiatif Lanskap/Yurisdiksi di Indonesia



# Lokasi Uji Coba Lanskap Blueprint



**Siak: Sekretariat Siak Hijau dan TKSKH**



**MITRA PELAKSANA**




**Pendanaan FPC**



**Aceh Tamiang: PUPL**



**MITRA PELAKSANA**



**Pendanaan FPC**




**Sintang: SEKBER**



**MITRA PELAKSANA**



**Solidaridad**

**Pendanaan FPC**




# Proses dan Tata Waktu Pelaksanaan



Penyelarasan pendekatan dengan para pihak, termasuk *kick-off* diskusi dengan MSF di tiga kabupaten ujicoba



Juni – Agustus

Kompilasi data dan kelanjutan pelibatan para pihak melalui pertemuan bilateral dan **lokakarya multipihak** untuk menyampaikan hasil pembelajaran dan diskusi:

- Aceh Tamiang: 10 Desember 2024
- Siak: 19 November 2024
- Sintang: 14 November 2024

Maret – Mei

September – Desember

<p><b>1. Multi-stakeholder Partnership &amp; Governance</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Best practice for multi-stakeholder processes to establish People, Nature and Climate Positive goals at landscape level and governance to implement aligned with CDP Maturity Framework</li> <li>Supporting processes to prevent unintended consequences</li> </ul>
<p><b>2. Action Plan</b></p> <p>Readiness to deliver key components including:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Establishing DCP sourcing areas for relevant commodities</li> <li>Consideration and mitigation and risks to climate and nature targets</li> <li>Guidance for how to set targets, including clear baseline and milestones, and verification options</li> </ul>
<p><b>3. Monitoring, Reporting and Verification</b></p> <p>MRV system that includes and transparently reports on progress of each of the implementation principles using the FPCL Landscape Reporting Framework. Link landscape progress to frameworks (SDG, SDTN, etc) and aligned with REDD+ claims guidance</p>
<p><b>4. Funding &amp; Strategy</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Models to deliver incentives</li> <li>Strategy to analyze additional funding (commercial investors, philanthropy, in both existing and new relations)</li> </ul>



Blueprint *gap assessment* di tiga kabupaten termasuk studi desktop, konsultasi bilateral dan *Focus Group Discussions* (FGD):






- Aceh Tamiang: 6 Agustus 2024
- Siak: 21 Agustus 2024
- Sintang: 27 Agustus 2024

Multi-stakeholder Forums in Indonesia

	Readiness Runway	Building the Foundation	Shared Vision	Expanding Structure	Transformation
<b>Leadership</b>	The existence of shared awareness and understanding of the issues, modalities, and challenges in the district.	The parties take the initiative to discuss issues in the district and work in parallel.	The parties are committed to collaborative leadership to address district issues.	There is a leadership and decision-making structure within the multi-stakeholder partnership.	Collaborative leadership influences various levels and aspects within the district system.
<b>Collaborative practice</b>	The parties engage in dialogue within the forum to discuss the plans and programs being worked on.	There is connectivity between the programs being implemented by the parties in the district.	There are joint programs and a roadmap agreed upon by the parties.	Collaborative actions are supported by the completeness of the multi-stakeholder partnership infrastructure.	The collaboration process has had an impact in opening up incentives in the district.
<b>Backbone Engagement</b>	There is personal interest in joining the backbone of the multi-stakeholder partnership secretariat.	There is a backbone secretariat for the multi-stakeholder partnership, and role distribution has been identified.	The backbone facilitates operational activities in the multi-stakeholder partnership secretariat.	The multi-stakeholder partnership secretariat backbone is capable of mobilizing resources, including financial resources.	The multi-stakeholder partnership backbone has been able to make changes in the system.
<b>Measuring &amp; evaluation</b>	The multi-stakeholder partnership understands the importance of the impact that needs to be measured.	There is an agreement on the methods, data, and impact measurement collectively.	The multi-stakeholder partnership has an agreement for data sharing.	The multi-stakeholder partnership has an impact measurement reporting system in a dashboard.	The multi-stakeholder partnership can measure impact collectively in the district.
<b>Governance Institution</b>	The function and urgency of the multi-stakeholder partnership have been collectively understood.	There are regulations that support the multi-stakeholder partnership.	The multi-stakeholder institution has been established through a decision from the institutional entity.	The multi-stakeholder institution already has resource investment entity.	The multi-stakeholder institution has achieved financial independence and functions as a data center, investment hub, and has a capacity-building role in the district.

# Forum Multipihak di Indonesia

Kabupaten Siak, Sintang dan Aceh Tamiang masing-masing memiliki forum multipihak (MSF) yang berperan sebagai wadah untuk koordinasi aksi antara tujuan pemerintah dan inisiatif mitra pembangunan. Skema sinyal perubahan di bawah ini digunakan untuk memahami kemajuan MSF di tingkat kabupaten. Kerangka ini mencerminkan siklus perubahan kolaboratif dengan memberi sinyal pada proses yang dilakukan oleh MSF di tingkat kabupaten. Kerangka kerja ini juga digunakan untuk mendorong pemahaman dan memfasilitasi pengembangan *roadmap* yang disepakati bersama.

	Inisiasi	Membangun Fondasi	Visi Bersama	Struktur	Transformasi
 <b>Kepemimpinan</b>	Adanya kesadaran dan pemahaman bersama tentang isu, modalitas dan tantangan di kabupaten	Para pihak berinisiatif membahas isu di kabupaten dan bekerja secara paralel	Para pihak berkomitmen dalam kepemimpinan kolaboratif untuk mengatasi isu kabupaten	Terdapat struktur kepemimpinan dan pengambil keputusan dalam kemitraan multipihak	Kepemimpinan kolaboratif mempengaruhi berbagai tingkatan dan aspek dalam sistem kabupaten
 <b>Kolaborasi</b>	Para pihak berdialog dalam forum untuk membahas rencana dan program yang dikerjakan	Terdapat konektivitas antar program yang dikerjakan para pihak di kabupaten	Terdapat program bersama dan peta jalan yang disepakati para pihak	Kemitraan multi pihak melaksanakan aksi kolaboratif dengan mempertimbangkan peningkatan komponen dalam mendukung kerjasama	Proses kolaborasi membuka insentif dan sudah memiliki dampak di kabupaten
 <b>Tim Inti</b>	Terdapat ketertarikan dari personal/kelompok untuk memperkuat/bergabung di dalam backbone sekretariat kemitraan multipihak	Terdapat backbone sekretariat kemitraan multipihak dan pembagian peran telah teridentifikasi	Backbone memfasilitasi kegiatan operasional di sekretariat kemitraan multipihak	Backbone sekretariat multipihak mampu memobilisasi sumber daya (SDM/ finansial/data)	Backbone kemitraan multipihak telah dapat melakukan perubahan dalam sistem
 <b>Pengukuran Dampak</b>	Kemitraan multipihak memahami pentingnya dampak kontribusi para pihak yang ingin diukur	Terdapat penyepakatan metode, data dan pengukuran dampak secara kolektif	Kemitraan multipihak memiliki kesepakatan berbagi data	Kemitraan multipihak memiliki sistem pelaporan pengukuran dampak dalam sebuah dashboard	Kemitraan multipihak dapat mengukur dampak secara kolektif di kabupaten
 <b>Institusi Kelembagaan</b>	Fungsi dan urgensi kemitraan multipihak telah dipahami bersama	Terdapat regulasi yang dapat mendukung kemitraan multi pihak	Kelembagaan multipihak telah terbentuk melalui surat keputusan entitas kelembagaan	Kelembagaan multipihak berfungsi sebagai pusat data/hub investasi/ memiliki peran peningkatan kapasitas di kabupaten	Kelembagaan multipihak sudah memiliki kemandirian sumber daya termasuk finansial dan mengukur berdampak yang dihasilkan

# Kriteria Sinyal Perubahan Forum Multipihak



**Kepemimpinan**

	Inisiasi	Membangun Fondasi	Visi Bersama	Struktur	Transformasi
Kepemimpinan	Adanya kesadaran dan pemahaman bersama tentang isu, modalitas dan tantangan di kabupaten	Para pihak berinisiatif membahas isu di kabupaten dan bekerja secara paralel	Para pihak berkomitmen dalam kepemimpinan kolaboratif untuk mengatasi isu kabupaten	Terdapat struktur kepemimpinan dan pengambil keputusan dalam kemitraan multipihak	Kepemimpinan kolaboratif memengaruhi berbagai tingkatan dan aspek dalam sistem kabupaten



**Kolaborasi**

Kolaborasi	Para pihak berdialog dalam forum untuk membahas rencana dan program yang dikerjakan	Terdapat konektivitas antar program yang dikerjakan para pihak di kabupaten	Terdapat program bersama dan peta jalan yang disepakati para pihak	Kemitraan multi pihak melaksanakan aksi kolaboratif dengan mempertimbangkan peningkatan komponen dalam mendukung kerjasama	Proses kolaborasi membuka insentif dan sudah memiliki dampak di kabupaten
------------	---	---	--	--	---



**Tim Inti**

Tim Inti	Terdapat ketertarikan dari personal/kelompok untuk memperkuat/bergabung di dalam backbone sekretariat kemitraan multipihak	Terdapat backbone sekretariat kemitraan multipihak dan pembagian peran telah teridentifikasi	<i>Backbone</i> memfasilitasi kegiatan operasional di sekretariat kemitraan multipihak	<i>Backbone</i> sekretariat multipihak mampu memobilisasi sumber daya (SDM/finansial/data)	Backbone kemitraan multipihak telah dapat melakukan perubahan dalam sistem
----------	--	--	--	--	--



**Pengukuran Dampak**

Pengukuran Dampak	Kemitraan multipihak memahami pentingnya dampak kontribusi para pihak yang ingin diukur	Terdapat penyepakatan metode, data dan pengukuran dampak secara kolektif	Kemitraan multipihak memiliki kesepakatan berbagi data	Kemitraan multipihak memiliki sistem pelaporan pengukuran dampak dalam sebuah dashboard	Kemitraan multipihak dapat mengukur dampak secara kolektif di kabupaten
-------------------	---	--	--	---	---



**Institusi Kelembagaan**

Institusi Kelembagaan	Fungsi dan urgensi kemitraan multipihak telah dipahami bersama	Terdapat regulasi yang dapat mendukung kemitraan multi pihak	Kelembagaan multipihak telah terbentuk melalui surat keputusan entitas kelembagaan	Kelembagaan multipihak berfungsi sebagai pusat data/hub investasi/ memiliki peran peningkatan kapasitas di kabupaten	Kelembagaan multipihak sudah memiliki kemandirian sumber daya termasuk finansial dan mengukur berdampak yang dihasilkan
-----------------------	--	--	--	--	---

# Kerangka Kerja Utama untuk Analisis Lanskap Blueprint



Ruang lingkup kerangka kerja blueprint dan lokasi ujicoba difokuskan pada tema-tema yang terdapat tumpang tindih antara prioritas perusahaan-perusahaan anggota Forest Positive Coalition (FPC) CGF, yang diwakili oleh indikator LRF, dan indikator KDSD, yang mewakili prioritas yurisdiksi.

**CGF Forest Positive Coalition - Landscape Reporting Framework (LRF)**  
*LRF digunakan oleh inisiatif lanskap untuk melaporkan target dan kemajuan dengan fokus pada KPI yang menjadi prioritas bagi koalisi perusahaan Forest Positive CGF.*

**Tidak termasuk dalam LRF** (tapi bisa saja merupakan prioritas perusahaan tertentu)

**Tema-tema berikut memiliki indikator yang sesuai dan termasuk dalam LRF**

**Tema yang dianalisis dalam 'Rencana Aksi'**



**Tema-tema lain termasuk:**

- Pengelolaan air
- Iklim
- Hak-hak pekerja
- Gender

**Tema-tema ini memiliki indikator yang termasuk dalam LRF**

**Kerangka Daya Saing Daerah (KDSD)**  
*Kerangka kerja penilaian untuk mengukur kemajuan dalam mencapai pembangunan berkelanjutan pada skala yurisdiksi. Kerangka kerja ini mencakup lima komponen utama: perencanaan dan penetapan tujuan, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, pengembangan lingkungan dan sumber daya alam, dan insentif.*

# 3. Hasil Analisa Lanskap Blueprint: Aceh Tamiang



# Aceh Tamiang



Kabupaten Aceh Tamiang merupakan bagian dari Provinsi Aceh, sektor pertanian memegang peranan penting dalam perekonomian dengan komoditas utama kelapa sawit, kelapa, karet, kopi dan kakao. Kelapa sawit merupakan komoditas unggulan Kabupaten Aceh Tamiang yang memiliki peran strategis bagi pembangunan daerah karena merupakan penyumbang terbesar PDRB Aceh Tamiang, yaitu sebesar 40% dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Dari sisi penyerapan tenaga kerja dan mata pencaharian, kelapa sawit juga merupakan sektor terbesar dalam menyediakan lapangan kerja dan sebagai sumber pendapatan bagi 60% dari total penduduk Aceh Tamiang. Pada tahun 2020, total luas perkebunan kelapa sawit di Aceh Tamiang adalah 21.956 ha.

Pemerintah Aceh Tamiang memiliki dua komitmen utama: PPI compact dan Rencana Aksi Daerah untuk Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD KSB). Kedua komitmen tersebut bertujuan untuk mempromosikan produksi kelapa sawit berkelanjutan, mengurangi deforestasi, melindungi ekosistem penting, dan mendorong kolaborasi para pemangku kepentingan dalam inisiatif lanskap/yurisdiksi.



# Kemajuan Komponen Lanskap Blueprint di Aceh Tamiang



Forum Multi Pihak & Tata Kelola	Rencana Aksi	Pemantauan & Pelaporan	Pendanaan & Strategi
Kepemimpinan	Komitmen keberlanjutan di tingkat kabupaten dan kemajuannya	Pengumpulan, pengelolaan, dan pemantauan data	Sumber dan mekanisme pendanaan
Aksi kolaboratif	Target dan kemajuan inisiatif lanskap pembiayaan pihak swasta	Pelaporan dan validasi	Kesenjangan pendanaan untuk mencapai tujuan dan target
<i>Backbone Engagement</i> (Kekuatan/kemantapan keterlibatan)	Roadmap: rencana aksi, di tingkat lanskap dan inisiatif, untuk mencapai target	Berbagi data dan platform yurisdiksi terintegrasi	
Pengukuran, pembelajaran, dan evaluasi			
Tata kelola lembaga			

*Tercapai*
 *Berproses*
 *Tahap awal*

# Poin-Poin Penting dari Forum Multipihak & Tata Kelola



Forum Multipihak & Tata Kelola
Kepemimpinan
Aksi Kolaboratif
Kekuatan/Kemantapan Keterlibatan
Pengukuran, Pembelajaran dan Evaluasi
Tata Kelola Lembaga

- Tercapai*
- Berproses*
- Tahap Awal*

## Temuan Utama/Kunci

- Pusat Unggulan Perkebunan Lestari (PUPL) Aceh Tamiang secara resmi didirikan berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Tamiang No.45/1263/2022 yang menguraikan tujuan, fungsi, tugas, dan struktur organisasi PUPL.
- Tujuan utama PUPL adalah untuk mempercepat pertanian berkelanjutan di Aceh Tamiang melalui tata kelola pemerintahan yang efektif, manajemen data & informasi, dan kolaborasi pemangku kepentingan.
- PUPL memiliki Tim Penasihat, Tim Pengarah, dan Tim Pelaksana. Tim pelaksana memiliki lima divisi: tata kelola multipihak, data dan informasi, investasi hijau, peningkatan kapasitas promosi dan negosiasi, dan kemitraan.
- Keputusan tersebut juga menetapkan individu-individu yang memegang peran-peran ini, termasuk mereka yang berasal dari dinas pemerintah kabupaten, organisasi masyarakat sipil, dan profesional.
- PUPL telah mengembangkan landasan untuk mempersiapkan sumber daya dan struktur dasar yang diperlukan untuk mendukung inisiatif berkelanjutan, namun peningkatan sumber daya dan kapasitas organisasi, kolaborasi antar pihak, sistem koordinasi/komunikasi, dan evaluasi adalah kunci untuk memastikan PUPL mencapai tujuan mereka.

*Lihat slide berikutnya untuk analisis PUPL terhadap Sinyal Kemajuan*

# Sinyal Perubahan PUPL Aceh Tamiang



**Kepemimpinan**

	Inisiasi	Membangun Fondasi	Visi Bersama	Struktur	Transformasi
	Aceh Tamiang memiliki RPD (Rencana Pembangunan Daerah) 2023-2026 yang menguraikan tujuan kabupaten menuju keberlanjutan	Kabupaten telah membentuk PUPL, sebuah forum multipihak untuk membahas isu keberlanjutan di lanskap	Lanskap berkomitmen pada Rencana Aksi Kabupaten tentang Minyak Sawit Berkelanjutan dan PPI Compact	PUPL memiliki struktur organisasi yang jelas, namun implementasi dari struktur yang telah disepakati masih perlu ditingkatkan	Komponen belum dikembangkan
	Pembahasan dalam RPJMD, Musrembang, dan pembahasan dalam PUPL melibatkan berbagai pemangku kepentingan	RPJMD, RAD KSB, dan PPI Compact sudah selaras	Pemerintah Aceh Tamiang memiliki Nota Kesepahaman untuk mengimplementasikan PPI Compact	PUPL, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, melakukan tindakan kolaboratif dengan mempertimbangkan peningkatan komponen untuk mendukung kerja sama.	
	Pemangku kepentingan yang memiliki visi yang sama, termasuk pemerintah, OMS, dan sektor swasta sepakat untuk bekerja sama	PUPL dibentuk dengan keputusan bupati, dengan tugas dan peran yang jelas	Tenaga profesional dipekerjakan untuk mendukung pekerjaan operasional PUPL dan untuk memfasilitasi koordinasi di antara para pemangku kepentingan	Mobilisasi sumber daya masih perlu dioptimalkan	
	Aceh Tamiang memiliki RPD (Rencana Pembangunan Daerah) 2023-2026 yang menguraikan tujuan kabupaten menuju keberlanjutan	Kabupaten telah membentuk PUPL, sebuah forum multipihak untuk membahas isu keberlanjutan di lanskap	Lanskap memiliki komitmen Rencana Aksi Kabupaten tentang Kelapa Sawit Berkelanjutan dan PPI Compact	PUPL memiliki struktur organisasi yang jelas, namun implementasi dari struktur yang telah disepakati masih perlu ditingkatkan	
	Fungsi dan urgensi dari kemitraan multipihak telah dipahami bersama.	Regulasi tentang inisiatif multipihak dikembangkan	Pendirian PUPL didukung oleh SK PUPL (Surat Keputusan)	PUPL memiliki tujuan dan tugas yang jelas, untuk mempercepat komitmen, namun implementasi struktur yang telah disepakati masih perlu ditingkatkan	



**Kolaborasi**



**Tim Inti**



**Pengukuran Dampak**



**Institusi Kelembagaan**

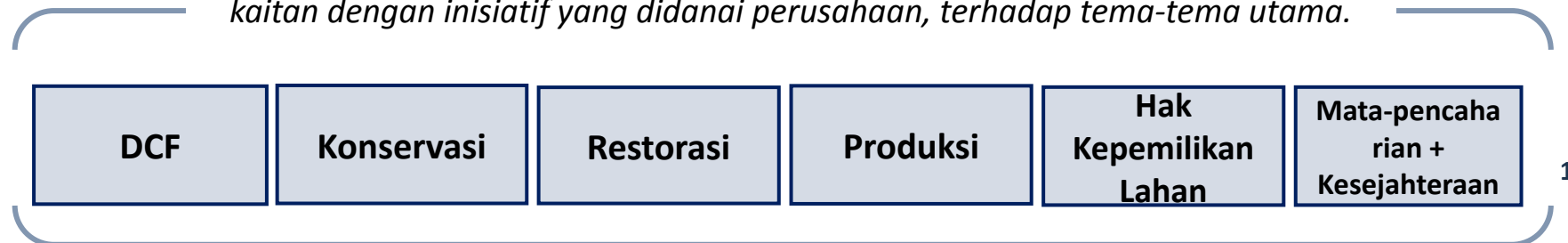
# Poin-Poin Penting Rencana Aksi



Rencana Aksi	Temuan Utama/Kunci
Komitmen dan kemajuan keberlanjutan di tingkat kabupaten	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD-KSB) telah ditandatangani. Namun, dokumen tersebut belum dipublikasikan secara resmi.</li><li>• Pemerintah Aceh Tamiang belum memiliki Target Bersama yang akan menjadi dasar dan acuan bagi para pemangku kepentingan setelah berakhirnya PPI Compact pada tahun 2023.</li><li>• Saat ini PUPL sedang menyusun PPI Compact untuk periode 2025-2030 berdasarkan Peta Jalan PUPL yang telah melalui konsultasi publik. PPI Compact ini akan menjadi target bersama Kabupaten Aceh Tamiang untuk periode 2025-2030.</li><li>• Perusahaan-perusahaan akan membantu pencapaian target tersebut (contohnya, PT. Unilever, PT. Musim Mas). Disarankan untuk melibatkan perusahaan lokal yang telah menunjukkan ketertarikannya selama FGD, seperti PT Mora dan PT Semadam. Diskusi lebih lanjut diperlukan untuk menjajaki potensi kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan tersebut.</li></ul>
Target dan kemajuan inisiatif lanskap yang didanai oleh sektor swasta	
Peta jalan: Rencana aksi, di tingkat kabupaten dan inisiatif, untuk memenuhi target	

- Tercapai
- Berproses
- Tahap Awal

*Slide berikut ini untuk melihat analisis target dan kemajuan kabupaten, termasuk kaitan dengan inisiatif yang didanai perusahaan, terhadap tema-tema utama.*



# Rencana Aksi & Kemajuan Aceh Tamiang



Target	Konservasi			Restorasi
		Mengurangi laju deforestasi hingga 50% pada 2020-2023 berdasarkan basis data tahun 2018	Membangun sistem pemantauan untuk yurisdiksi dan ketertelusuran pada periode 2020-2023	Meningkatkan perlindungan kawasan hutan dan Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) melalui kerangka regulasi daerah pada periode 2020-2023
<b>Pihak yang menetapkan target dan membantu mencapai target</b>	PPI Compact: Nota Kesepahaman antara Bupati Kabupaten Aceh Tamiang, Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah III - Aceh, Yayasan IDH, GAPKI - Aceh, Yayasan FKL, Kelompok Tani dan Nelayan Aceh Tamiang.			
<b>Kemajuan pencapaian target</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sumber : <a href="https://acehdata.digdata.id/data-kawasan-ekosistem-leuser/">https://acehdata.digdata.id/data-kawasan-ekosistem-leuser/</a> - Haka mencatat bahwa Aceh Tamiang telah berhasil mengurangi laju deforestasi dari 239 ha pada tahun 2019 dan 387 ha pada tahun 2020 menjadi 36 ha pada tahun 2023.</li> <li>Masih menunggu laporan PPI Compact tersedia untuk publik.</li> </ul>	Menunggu laporan PPI Compact tersedia untuk publik.		Laporan Unilever - Reimagining landscape : membantu pencapaian target 5.000 ha hutan yang akan dikonservasi dan merestorasi 500 ha dengan menanam 60.000 pohon di hutan yang terdegradasi dan area lain yang sebelumnya ditanami kelapa sawit secara ilegal.
<b>Sumber pendanaan untuk mendukung target</b>	Biaya pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing pihak.			<ul style="list-style-type: none"> <li>Biaya pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing pihak.</li> <li>Kemitraan IDH dan Unilever.</li> </ul>

# Rencana Aksi & Kemajuan Aceh Tamiang



Target	Produksi	Hak Kepemilikan Lahan (STDB)	Dukungan terhadap Petani Kecil dan Mata-pencaharian	Hak Pekerja dan gender
<b>Pihak yang menetapkan target dan membantu mencapai target</b>	PPI Compact: Nota Kesepahaman antara Bupati Kabupaten Aceh Tamiang, Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah III - Aceh, Yayasan IDH, GAPKI - Aceh, Yayasan FKL, Kelompok Tani dan Nelayan Aceh Tamiang			
<b>Kemajuan pencapaian target</b>	Sumber Source-up : <ul style="list-style-type: none"> <li>Tahun 2022 : 4.3 ton/cpo/ha/thn</li> <li>Tahun 2023 : 2.93 ton/cpo/ha/thn</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sumber Source-up : informasi belum tersedia</li> <li>Laporan Unilever - Reimagining landscape : 3.200 petani telah memperoleh legalitas lahan dan STDB</li> </ul>	Laporan Unilever - Reimagining landscape <ul style="list-style-type: none"> <li>Unilever telah membantu FKL dan masyarakat setempat menanam lebih dari 7.500 pohon melalui skema wanatani yang menghasilkan buah untuk dikonsumsi dan dijual.</li> <li>Memberikan pelatihan agroforestri kepada 100 anggota masyarakat, termasuk setidaknya 50 perempuan</li> </ul>	Tidak ada laporan publik atau resmi yang tersedia
<b>Sumber pendanaan untuk mendukung target</b>	Biaya pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing pihak	<ul style="list-style-type: none"> <li>Biaya pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing pihak</li> <li>Kemitraan IDH dan Unilever</li> </ul>	Biaya pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing pihak	

# Rencana Aksi & Kemajuan Aceh Tamiang



Target	Dukungan terhadap petani kecil dan mata pencaharian	Monitoring dan Respon terhadap Deforestasi	Keterlibatan
<b>Pihak yang menetapkan target dan membantu mencapai target</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Strategi lima tahun Musim Mas 2020-2025.</li> <li>Musim Mas berkolaborasi dengan IDH, Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, Forum Konservasi Leuser (FKL), PUPL, pelaku industri hilir (Unilever, PepsiCo), dan para pemasok.</li> </ul>	Strategi lima tahun Musim Mas 2020-2025.	PPI Compact: Nota Kesepahaman antara Bupati Kabupaten Aceh Tamiang, Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah III - Aceh, Yayasan IDH, GAPKI - Aceh, Yayasan FKL, Kelompok Tani dan Nelayan Aceh Tamiang.
<b>Kemajuan pencapaian target</b>	Musim Mas Report 2022/23: Project in the Aceh landscape: <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Smallholders Hub</i> yang didirikan di Aceh pada tahun 2020 merupakan bagian dari inisiatif <i>Verified Sourcing Area (VSA)</i> yang dipimpin oleh Inisiatif Perdagangan Berkelanjutan (IDH).</li> <li>Pelatihan Praktik Pertanian yang Baik (GAP) untuk 120 petani kecil.</li> <li>Melatih 73 petugas penyuluh desa.</li> <li>Melatih 2.495 petani kecil, Mengadakan pelatihan di 40 desa.</li> </ul>	Musim Mas mendukung IDA. IDA merupakan platform inovatif dari GFW dan mendukung berbagai lembaga/universitas yang menyediakan peringatan deforestasi melalui beberapa sistem analisis, yaitu GLAD, GLAD-S2, dan RADD. Platform ini dapat mendeteksi perubahan pada hutan primer serta area yang telah ditanami dan hutan yang lebih muda.  Status: Sedang berjalan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembentukan MSF: PUPL.</li> <li>Kabupaten Aceh Tamiang telah mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 680 Tahun 2019, tentang pembentukan Gugus Tugas Center of Excellence (CoE) Aceh Tamiang. CoE ini akan menjadi wadah multipihak dalam mengelola tanaman perkebunan berkelanjutan di Aceh Tamiang.</li> </ul>
<b>Sumber pendanaan untuk mendukung target</b>	Musim Mas melalui kemitraan dengan para mitranya mendukung pelaksanaan PPI Compact.		Dukungan donor: IDH, LTKL, FKL

# Poin-Poin Penting Pemantauan & Pelaporan



Pemantauan & Pelaporan
Pengumpulan, Pengelolaan, dan Pemantauan Data
Pelaporan dan Validasi
Penggunaan data dan platform yurisdiksi yang terintegrasi

Temuan Utama/Kunci
<ul style="list-style-type: none"><li>• Kerangka kerja pemantauan dan pelaporan oleh PUPL berada di fase awal, namun telah dimulai upaya pengumpulan data untuk program-program tertentu. <i>Contoh: Musim Mas, melalui PPI compact, menyediakan platform untuk memantau peringatan deforestasi di lanskap. Platform ini memungkinkan Musim Mas untuk mendeteksi perubahan pada hutan primer, hutan sekunder, dan area perkebunan.</i></li><li>• Alat yang digunakan untuk pengumpulan data secara keseluruhan masih bersifat dasar, mengandalkan input manual atau sistem sederhana untuk mengumpulkan informasi dari lapangan. Hal ini termasuk mengumpulkan data dari perkebunan, pemangku kepentingan, dan upaya melibatkan masyarakat. Lanskap akan mendapatkan manfaat dari pemahaman situasi saat ini, mengidentifikasi kesenjangan, dan menetapkan garis dasar untuk mengukur kemajuan di masa depan.</li><li>• Saat ini belum ada alat atau kerangka kerja standar pengumpulan dan pemantauan data yang bisa berdampak pada pengambilan keputusan, perencanaan, dan penyusunan strategi.</li><li>• Investasi dalam sumber daya manusia dan kapasitas PUPL untuk analisis dan pelaporan data, termasuk pengukuran dampak, akan bermanfaat dalam mendukung peningkatan kapasitas PUPL.</li><li>• Seiring dengan berkembangnya sistem, PUPL juga dapat meningkatkan aksesibilitas data dan pelaporan kepada semua pemangku kepentingan terkait, termasuk pemerintah, CSO, dan masyarakat.</li></ul>

- Tercapai*
- Berproses*
- Tahap Awal*




# Poin-Poin Penting Pendanaan & Strategi



## Pendanaan & Strategi

Sumber dan mekanisme pendanaan

Kesenjangan pendanaan untuk mencapai tujuan dan target

-  *Tercapai*
-  *Berproses*
-  *Tahap Awal*

## Temuan Utama/Kunci

- Pendanaan kegiatan di Lanskap Aceh Tamiang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK), kontribusi perusahaan, dan organisasi masyarakat sipil.
- Saat ini belum ada mekanisme yang mengatur sumber dan alokasi dana untuk lanskap.
- Operasional PUPL masih didanai oleh pemerintah dan berbasis proyek oleh organisasi masyarakat sipil. PUPL bukan merupakan Lembaga berbadan hukum, oleh karena itu mereka tidak memiliki sistem pendanaan.
- Rekomendasi tahapan selanjutnya untuk PUPL:
  - Perlu memiliki status hukum yang jelas
  - Perlu membangun mekanisme pendanaan

# 4. Hasil Analisa Lanskap Blueprint Siak



# Siak



Kabupaten Siak terletak di Provinsi Riau, memiliki luas wilayah sekitar 8.556 km<sup>2</sup>. Kabupaten ini terkenal dengan kawasan hutannya yang luas, mencakup sekitar 1,2 juta hektar, dengan zona kehutanan yang mencakup sekitar 1,1 juta hektar. Industri kelapa sawit di kabupaten ini cukup besar, dengan luas perkebunan sekitar 500.000 hektar, termasuk kontribusi dari petani swadaya dan perkebunan swasta, dengan total 40-45% dimiliki oleh petani swadaya. Terdapat 22 pabrik kelapa sawit dan kilang minyak di kabupaten ini, yang mendukung pengolahan minyak kelapa sawit. Selain itu, Siak memiliki lahan gambut yang luas, diperkirakan sekitar 400.000 hektar. Siak memiliki sejarah kebakaran lahan gambut, terutama selama musim kemarau, yang telah menyebabkan masalah lingkungan dan kesehatan selama bertahun-tahun.

Pemerintah Siak memiliki dua rencana aksi kabupaten, yaitu Siak Hijau (Siak Kabupaten Hijau) dan Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD KSB). Siak Hijau bertujuan untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan, konservasi keanekaragaman hayati, dan dampak mitigasi perubahan iklim. Sementara itu, tujuan dari RAD KSB adalah untuk mencapai produksi kelapa sawit yang berkelanjutan.



MSF: TKSHKH



Mitra Pelaksana



Pendanaan



# Kemajuan Komponen Lanskap Blueprint di Siak



Forum Multi Pihak & Tata Kelola	Rencana Aksi	Pemantauan & Pelaporan	Pendanaan & Strategi
Kepemimpinan	Komitmen keberlanjutan di tingkat kabupaten dan kemajuannya	Pengumpulan, pengelolaan, dan pemantauan data	Sumber dan mekanisme pendanaan
Aksi kolaboratif	Target dan kemajuan inisiatif lanskap pembiayaan pihak swasta	Pelaporan dan validasi	Kesenjangan pendanaan untuk mencapai tujuan dan target
<i>Backbone Engagement</i> (Kekuatan/kemantapan keterlibatan)	Roadmap: rencana aksi, di tingkat lanskap dan inisiatif, untuk mencapai target	Berbagi data dan platform yurisdiksi terintegrasi	
Pengukuran, pembelajaran, dan evaluasi			
Tata kelola lembaga			

*Tercapai*
 *Berproses*
 *Tahap Awal*

# Poin-Poin Penting dari Forum Multipihak & Tata Kelola



Forum Multipihak & Tata Kelola
Kepemimpinan
Praktik Kolaboratif
Kekuatan/Kemantapan Keterlibatan
Pengukuran, Pembelajaran dan Evaluasi
Tata Kelola Lembaga

- Tercapai*
- Berproses*
- Tahap Awal*

## Temuan Utama/Kunci

- Tim Koordinasi Siak Kabupaten Hijau (TKSKH) berperan sebagai MSF di Lanskap Siak. TKSKH dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati No. 234/HK/KPTS/2019.
- Surat keputusan tersebut menguraikan tujuan, tugas, dan struktur organisasi TKSKH. SK tersebut juga menyatakan bahwa tim implementasi dan pembiayaan dapat dibentuk untuk mendukung program TKSKH.
- Tim lokal yang terdiri dari para profesional muda, mendukung kegiatan operasional dan bertindak sebagai jembatan antara pemerintah dan mitra pelaksana.
- Saat ini belum ada mekanisme komunikasi dalam struktur TKSKH. Proses komunikasi dikembangkan secara organik.
- Merujuk pada analisis Sinyal Perubahan, TKSKH telah memiliki kekuatan dalam struktur organisasi dan dukungan dari pemerintah kabupaten dan mitra. Namun, koordinasi untuk menghasilkan rencana aksi yang disepakati bersama belum dilaksanakan secara konsisten. Hal ini mungkin disebabkan oleh tantangan untuk mengadakan pertemuan rutin, karena jarak antara Pekanbaru dan Siak menjadi kendala, dimana sebagian besar mitra berbasis di Pekanbaru.

*Lihat slide berikutnya untuk analisis TKSKH terhadap Signal Kemajuan*

# Sinyal Perubahan Siak TKSKH

  
Kepemimpinan

  
Kolaborasi

  
Tim Inti

  
Pengukuran Dampak

  
Institusi Kelembagaan

Inisiasi	Membangun Fondasi	Visi Bersama	Struktur	Transformasi
Lanskap yang berkomitmen pada Rencana Aksi Kabupaten tentang Kelapa Sawit Berkelanjutan, Siak Hijau, dan selaras dengan RPJMD	TKSKH berperan sebagai wadah bagi para pemangku kepentingan untuk melakukan dialog	Inisiatif yang dipimpin oleh sektor swasta dan LSM/NGO berkomitmen untuk mendukung Siak Hijau dan RAD-KSB	Siak Hijau memiliki struktur organisasi yang jelas dan dalam proses pengambilan keputusan.	Komponen belum dikembangkan
Melalui Musrenbang, berbagai pemangku kepentingan mendiskusikan visi kabupaten	Terdapat konektivitas antara program-program yang dilaksanakan oleh para pemangku kepentingan. yaitu SPLP, Earthworm, WRI	Inisiatif yang dipimpin oleh sektor swasta dan LSM/NGO berkomitmen untuk mendukung Siak Hijau dan RAD KSB	Tindakan kolaboratif oleh berbagai pemangku kepentingan yang dibentuk di lapangan, dialog-dialog yang difasilitasi oleh pemerintah.	
Pemangku kepentingan yang tertarik untuk mendukung lanskap secara sukarela, misalnya melalui SPLP, Earthworm	Surat Keputusan Bupati yang menguraikan tujuan dan tugas TKSKH.	TKSKH didukung oleh tenaga profesional muda untuk melakukan tugas-tugas fasilitasi dan koordinasi	TKSKH masih membutuhkan dukungan kapasitas untuk memobilisasi sumber daya.	
TKSKH memahami pentingnya dampak yang perlu diukur.	Para pemangku kepentingan sepakat untuk menggunakan kerangka kerja yang sama untuk menentukan target dan mengukur kemajuan, yaitu LRF, KDSD, RAD-KSB	Mekanisme pembagian data yang tersedia dalam inisiatif yang dipimpin oleh sektor swasta, yaitu SPLP	Mekanisme pengukuran dampak yang tersedia dalam inisiatif utama sektor swasta. Yaitu: SPLP	
Surat keputusan tersebut menguraikan visi dan misi TKSKH yang selaras dengan komitmen Siak Hijau	Regulasi tentang inisiatif multipihak belum berkembang	Lembaga Multipihak telah dibentuk dan diresmikan dengan Keputusan Bupati	Tugas TKSKH untuk mendukung Komitmen Siak Hijau dan bertindak sebagai jembatan komunikasi antar pihak, belum berfungsi sebagai pusat data	

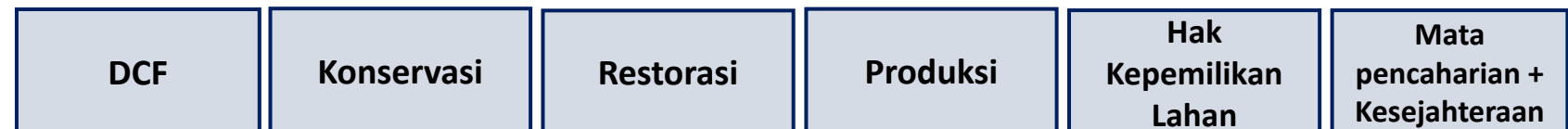
# Poin-Poin Penting Rencana Aksi



Rencana Aksi	Temuan Utama/Kunci
Komitmen dan kemajuan keberlanjutan di tingkat kabupaten	<p>Beberapa inisiatif telah dilaksanakan untuk menyelaraskan dengan Siak Hijau dan RAD KSB:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Program Lanskap Siak Pelalawan (SPLP): Program ini berfokus pada produksi kelapa sawit berkelanjutan, konservasi hutan, dan restorasi lahan gambut. SPLP merupakan kolaborasi antara pemerintah, perusahaan kelapa sawit, dan mitra pelaksana (Proforest, Daemeter, Jejakin, WRI, CNV) untuk mengimplementasikan kebijakan NDPE (No Deforestation, No Peat, No Exploitation) dan meningkatkan ketelusuran rantai pasokan.</li><li>• Inisiatif dari Earthworm Foundation (EF): EF bekerja untuk menyeimbangkan produksi komoditas dengan konservasi hutan dan mata pencaharian yang berkelanjutan. Upaya mereka meliputi melibatkan masyarakat, resolusi konflik, dan mempromosikan praktik pertanian terbaik pada petani kecil.</li><li>• Koalisi Private Sektor untuk Siak Hijau (KPSSH): KPSSH mendukung inisiatif Siak Hijau, yang bertujuan untuk mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Inisiatif ini melibatkan perusahaan swasta dalam membangun kapasitas petani kecil, mencapai sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), dan mencegah kebakaran hutan dan lahan.</li><li>• Koalisi Sedagho Siak: Sebuah koalisi LSM lingkungan, Sodagho Siak mendukung inisiatif Siak Hijau dengan fokus pada restorasi lahan gambut dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Mereka berkolaborasi dengan masyarakat setempat untuk merestorasi ekosistem lahan gambut dan mempromosikan manfaat ekonomi dari penggunaan lahan yang berkelanjutan.</li></ul>
Target dan kemajuan inisiatif lanskap yang didanai oleh sektor swasta	
Peta jalan: Rencana aksi, di tingkat kabupaten dan inisiatif, untuk memenuhi target	

- Tercapai
- Berproses
- Tahap Awal

Slide berikut ini untuk melihat analisis target dan kemajuan kabupaten, termasuk kaitan dengan inisiatif yang didanai perusahaan, terhadap tema-tema utama



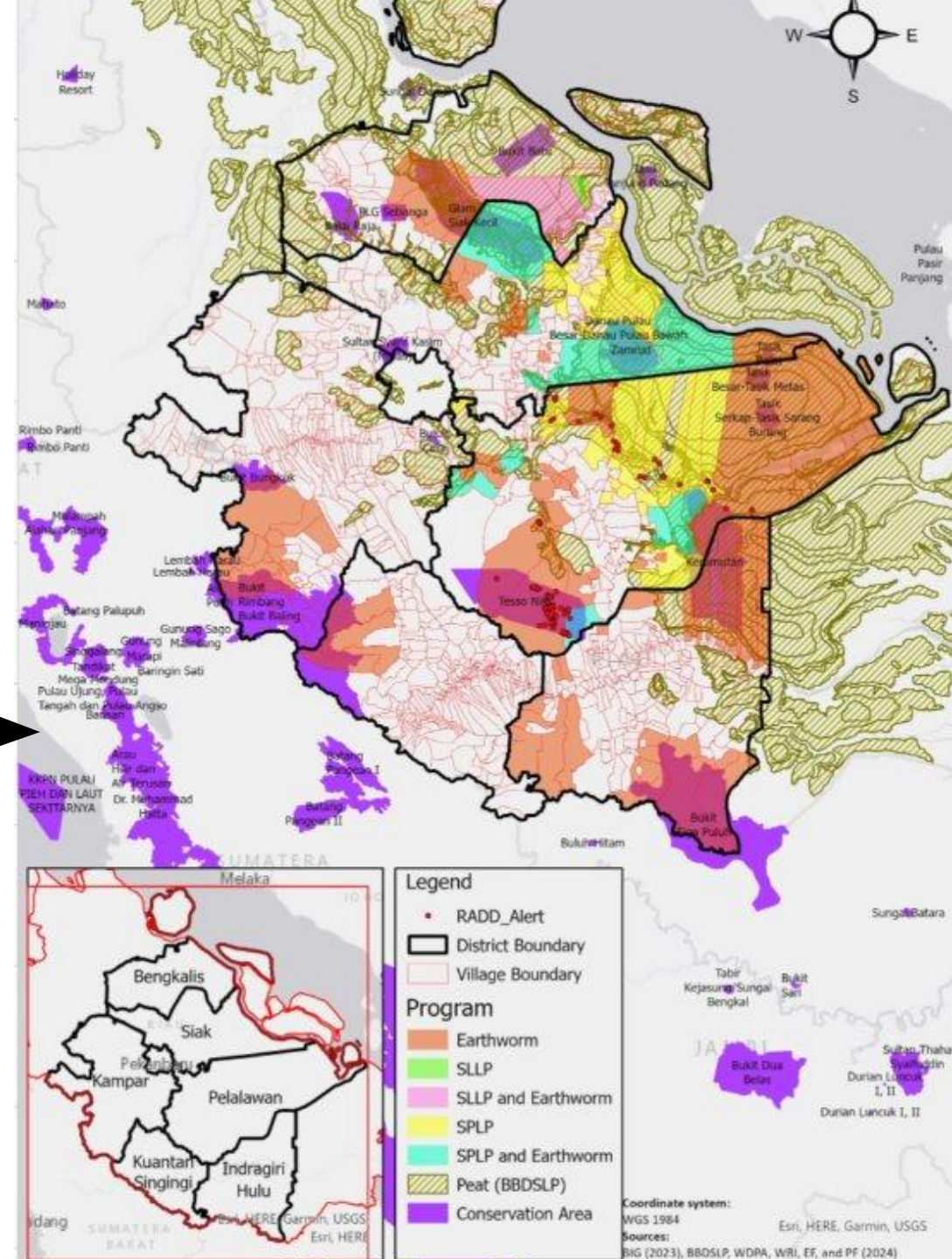
# Koordinasi antara mitra pelaksana di Lanskap Siak

Riau Landscape Initiative (Earthworm), Siak Pelalawan Landscape Programme-SPLP- (Daemeter dan Proforest), dan WRI mengimplementasikan kegiatan dukungan desa di daerah-daerah yang saling tumpang tindih di Riau, termasuk di Kabupaten Siak.

Untuk meningkatkan koordinasi dan mengurangi inefisiensi, para pelaksana kegiatan di lanskap ini menyelesaikan pemetaan desa dan kegiatan di mana mereka beroperasi yang menghasilkan peta ini.

Kabupaten akan mendapatkan manfaat dari koordinasi rutin antara pelaksana yang dipimpin di tingkat kabupaten yang mendukung pencapaian tujuan kabupaten. pencapaian tujuan-tujuan kabupaten

Roadmap: Rencana Aksi di tingkat kabupaten dan inisiatif lanskap, untuk mencapai target





# Rencana Aksi & Kemajuan Siak

\*Inisiatif SPLP and Riau Earthworm sedang mempertimbangkan target setelah tahun 2025



Target	Konservasi	Restorasi	Target DCF
<b>Pihak yang menetapkan target dan membantu mencapai target</b>	<p>Hutan lindung pemerintah kabupaten di luar konsesi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Target ditetapkan oleh Green Siak yang dipimpin oleh Pemerintah Kabupaten untuk melindungi gambut dan degradasi badan sungai.</li> <li>- Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan mitra pembangunan (OMS/LSM), (Elang dengan Pemerintah Kabupaten Siak dalam mendorong komitmen NDPE, APP APRIL).</li> <li>- Target ini juga didukung oleh SPLP dengan melibatkan desa-desa yang memiliki hutan dan gambut untuk memahami dan membangun komitmen.</li> </ul>	<p>Rehabilitasi gambut dalam di luar konsesi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Target yang ditetapkan oleh Green Siak yang dipimpin oleh Pemerintah Kabupaten untuk melindungi gambut dan merehabilitasi gambut yang terdegradasi.</li> <li>- Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan mitra pembangunan (LSM/NGO).</li> </ul>	<p>Hentikan pengembangan gambut (izin kehutanan di dalam kawasan hutan &amp; izin perkebunan di APL)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Target yang ditetapkan oleh Green Siak yang dipimpin oleh Pemerintah Kabupaten untuk menghentikan deforestasi dan konversi lahan.</li> <li>- Kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah nasional untuk menghentikan konversi lahan.</li> <li>- Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan mitra pembangunan (LSM/NGO).</li> </ul>
<b>Kemajuan pencapaian target</b>	<p>Kemajuan tidak dilaporkan oleh Siak Hijau - Mekanisme MRV tidak ada.</p>		<p>Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPIB).</p>
<b>Sumber pendanaan untuk mendukung target</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anggaran negara, swasta, dan sumber lainnya.</li> <li>- Diperlukan dana tambahan untuk melaksanakan proses awal pengumpulan data. Anggaran negara hanya mampu mendukung proses verifikasi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anggaran negara, swasta, dan sumber-sumber lainnya.</li> <li>- Diperlukan dana tambahan untuk melaksanakan kegiatan. APBN hanya mampu mendukung proses verifikasi (di luar kewenangan kabupaten)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anggaran negara, swasta, dan sumber lainnya</li> <li>- Diperlukan dana tambahan untuk melaksanakan pemantauan dan verifikasi lapangan. Anggaran negara hanya mampu mendukung data.</li> </ul>



Target	Produksi	Hak Kepemilikan Lahan (STDB)	Dukungan terhadap Petani Kecil dan Mata-pencaharian	Manfaat dan mata pencaharian masyarakat secara umum
<p><b>Pihak yang menetapkan target dan membantu mencapai target</b></p>	<p>100% Perkebunan Tertsertifikasi ISPO &amp; RSPO pada tahun 2026</p>	<p>Pemerintah Kabupaten Siak menargetkan minimal 1.000 sertifikat diterbitkan setiap tahunnya</p>	<p>Mendukung lembaga Petani Swadaya untuk mendapatkan Sertifikasi ISPO &amp; RSPO</p>	<p>Pengembangan praktik-praktik Paludikultur</p>
<p><b>Kemajuan pencapaian target</b></p>  	<p>Mekanisme MRV tidak tersedia.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- MRV Mekanisme MRV tidak tersedia.</li> <li>- SPLP, KPSSH, dan NGO tidak mendukung pengumpulan data.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan kapasitas tentang GAP, dan Sertifikasi untuk petani kecil yang menargetkan 3.245 ISH dari MSF.</li> <li>- <b>SPLP</b> mendukung pelatihan GAP untuk 4.012 ISH.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Modul telah dikembangkan, dan demo plot diuji cobakan.</li> <li>- Model ekonomi melingkar dengan menggunakan sagu dimulai di 3 desa.</li> <li>- Kegiatan yang menghasilkan pendapatan telah dimulai.</li> </ul>
	<p><b>Earthworm:</b> Untuk seluruh Riau, program ini memiliki target untuk penanaman kembali kelapa sawit, pelatihan GAP, meningkatkan diversifikasi pendapatan dan ketahanan pangan, memperkuat kepemilikan lahan bagi masyarakat yang bergantung pada hutan. Target dan kemajuan hanya untuk Siak yang belum terkumpul.</p>			
<p><b>Sumber pendanaan untuk mendukung target</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anggaran negara, swasta, dan sumber lainnya.</li> <li>- Pendanaan tambahan yang diperlukan untuk mengimplementasikan dan mendukung proses-proses tersebut.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anggaran negara, swasta, dan sumber lainnya.</li> <li>- Diperlukan dana tambahan untuk melaksanakan proses awal pengumpulan data. Anggaran negara hanya mampu mendukung proses verifikasi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anggaran negara, swasta, dan sumber lainnya.</li> <li>- Diperlukan dana tambahan untuk mengimplementasikan dalam cakupan yang lebih luas dan intensif serta memantau perkembangan dampak.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anggaran negara, swasta, dan sumber lainnya.</li> <li>- Pendanaan tambahan yang diperlukan untuk meningkatkan skala dan juga memantau kemajuan dampak.</li> </ul>

# Rencana Aksi & Kemajuan Siak



Target	Target Iklim
	Mengurangi 30% emisi GRK dari baseline 2019 dari 5 sektor
<b>Pihak yang menetapkan target dan membantu mencapai target</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pemerintah Kabupaten Siak telah menetapkan target untuk mengurangi emisi GRK dari 5 sektor (Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Industri, Minyak dan Gas).</li><li>- Dilaksanakan oleh organisasi pemerintah daerah, sektor swasta dan mitra pembangunan.</li></ul>
<b>Kemajuan pencapaian target</b>	Mekanisme MRV tidak tersedia
<b>Sumber pendanaan untuk mendukung target</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Anggaran negara, swasta, dan sumber lainnya.</li><li>- Pendanaan tambahan yang diperlukan untuk melaksanakan dan memantau kemajuan menuju sasaran.</li></ul>

# Poin-Poin Penting Pemantauan & Pelaporan



Pemantauan & Pelaporan
Pengumpulan, Pengelolaan, dan Pemantauan Data
Pelaporan dan Validasi
Penggunaan data dan platform yurisdiksi yang terintegrasi

- Tercapai*
- Berproses*
- Tahap Awal*

Temuan Utama/Kunci
<ul style="list-style-type: none"><li>• Pemantauan dan evaluasi untuk Rencana Aksi Kabupaten Siak Hijau dan RAD KSB dilakukan dengan menggunakan pendekatan <i>self-assessment</i>, dimana para pemangku kepentingan melakukan penilaian mandiri terhadap program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Kabupaten Siak Hijau dan RAD KSB.</li><li>• Setiap inisiatif memiliki mekanisme pengumpulan data, pemantauan kemajuan, dan pelaporan masing-masing.</li><li>• Untuk memudahkan koordinasi dan sinkronisasi program-program Kabupaten Siak Hijau, maka kegiatan monitoring dan evaluasi dikoordinasikan melalui TKSKH. Saat ini, validasi data masih belum dilaksanakan.</li><li>• Melalui program SPLP, Jejakin mengembangkan platform bernama <u>Idaman Siak Pelalawan</u>. Saat ini, platform tersebut hanya merekam perkembangan Program Lanskap Siak Pelalawan (SPLP) dan dapat diakses oleh para pemangku kepentingan terkait, seperti Pemerintah Kabupaten Siak dan Pelalawan, mitra SPLP, dan koalisi perusahaan. Namun, terdapat potensi untuk mengembangkan platform data untuk Siak dan Pelalawan.</li></ul>




# Poin-Poin Penting Pendanaan & Strategi



## Pendanaan & Strategi

Sumber dan mekanisme pendanaan

Kesenjangan pendanaan untuk mencapai tujuan dan target

-  *Tercapai*
-  *Berproses*
-  *Tahap Awal*

## Temuan Utama/Kunci

- TKSKH belum memiliki skema pendanaan bersama untuk melaksanakan program-programnya.
- Setiap lembaga lokal/internasional dan pemerintah kabupaten yang terlibat, menjalankan programnya masing-masing dengan sumber pendanaan yang terpisah.
- TKSKH perlu bertindak sebagai jembatan untuk membangun skema pendanaan bersama. Guna mengatasi isu-isu strategis, perlu dilakukan penilaian program untuk menentukan biaya yang diperlukan. Setelah valuasi program untuk isu-isu strategis disusun, skema pendanaan dapat ditetapkan.
- Inovasi pendanaan Swakelola Tipe III sangat relevan dalam mendukung kebijakan Siak Hijau yang bertujuan untuk melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Masyarakat tidak hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai mitra aktif dalam mengelola isu-isu lingkungan. Skema ini memungkinkan para pihak untuk lebih fleksibel dan adaptif dalam merancang program yang pada dasarnya selaras dengan inisiatif pemerintah.

# 5. Hasil Analisa Lanskap Blueprint Sintang



Amazing  
KELAM



# Sintang



Kabupaten Sintang terletak di Provinsi Kalimantan Barat. Perekonomian kabupaten ini sangat bergantung pada sektor sumber daya alam berbasis lahan, terutama pertanian dan perkebunan. Komoditas pertanian utama di Sintang adalah kelapa sawit, kelapa, karet, kopi, dan kakao. Pada tahun 2022, produksi kelapa sawit di Sintang mencapai 772.401 Ton.

Komitmen Sintang sebagai Kabupaten Berkelanjutan diperkuat melalui beberapa dokumen kerangka kerja utama, antara lain:

- Rencana Aksi Daerah - Sintang Lestari: Bertujuan untuk memfasilitasi transisi sistemik Kabupaten Sintang menuju pembangunan berkelanjutan dan berfungsi sebagai landasan bagi lembaga pemerintah untuk mengimplementasikan pekerjaan dan rencana strategis mereka.
- Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD KSB): RAD-KSB adalah dokumen rencana aksi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka meningkatkan produksi, produktivitas, nilai, dan daya saing komoditas kelapa sawit di Kabupaten Sintang.
- Rencana Aksi Lanskap Kolektif (CLAP): Difasilitasi oleh Rainforest Alliance (RA) bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Sintang dan mitra pembangunan, rencana aksi ini mengeksplorasi program dan aksi potensial yang disesuaikan dengan karakteristik lanskap Sintang.
- Tata Kelola Kolaboratif Sintang: ditetapkan melalui surat keputusan, mengatur kolaborasi antara pemerintah dan mitra pembangunan untuk mencapai tujuan-tujuan utama daerah dan menyelaraskannya dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).



# Kemajuan Komponen Lanskap Blueprint di Sintang



Forum Multistakeholder & Tata Kelola	Action plan	Monitoring & reporting	Funding & Strategy
Kepemimpinan	Komitmen keberlanjutan di tingkat kabupaten dan kemajuannya	Pengumpulan, pengelolaan, dan pemantauan data	Sumber dan mekanisme pendanaan
Aksi kolaboratif	Target dan kemajuan inisiatif lanskap pembiayaan pihak swasta	Pelaporan dan validasi	Kesenjangan pendanaan untuk mencapai tujuan dan target
<i>Backbone Engagement</i> (Kekuatan/kemantapan keterlibatan)	Roadmap: rencana aksi, di tingkat lanskap dan inisiatif, untuk mencapai target	Berbagi data dan platform yurisdiksi terintegrasi	
Pengukuran, pembelajaran, dan evaluasi			
Tata kelola lembaga			

*Tercapai*
 *Berproses*
 *Tahap Awal*

# Poin-Poin Penting dari Forum Multipihak & Tata Kelola



Forum Multipihak & Tata Kelola
Kepemimpinan
Praktik Kolaboratif
Kekuatan/Kemantapan Keterlibatan
Pengukuran, Pembelajaran dan Evaluasi
Tata Kelola Lembaga

- Tercapai*
- Berproses*
- Tahap Awal*

## Temuan Utama/Kunci

- Kabupaten Sintang memiliki Sekretariat Bersama (SekBer) yang berperan sebagai forum Multipihak dalam lanskap. SekBer dibentuk melalui Keputusan Bupati, yang juga menjabarkan tujuan, peran, sistem, dan sasaran bersama.
- Tujuan utama SekBer adalah untuk memperkuat koordinasi, integrasi, sinergi, dan kolaborasi antara para pemangku kepentingan dalam rangka untuk pembangunan berkelanjutan di Sintang. SekBer terdiri dari pemerintah, organisasi masyarakat sipil, perusahaan, dan akademisi.
- SekBer mengadakan pertemuan rutin, dengan tata waktu yang bervariasi. Setiap pertemuan membahas isu tematik. Proses pengambilan keputusan dilakukan melalui dialog dan rapat secara kolektif.
- Berdasarkan hasil analisis Sinyal Perubahan, Sekber telah menunjukkan kekuatan melalui dukungan dari pemerintah kabupaten dan mitra yang berpengaruh dalam membentuk dinamika dan sistem kolaborasi. Inovasi yang dihasilkan melalui kolaborasi antar pemangku kepentingan menjadi jembatan dalam menciptakan keharmonisan kerjasama di Kabupaten Sintang.

*Lihat slide berikutnya untuk analisis SekBer terhadap Sinyal Perubahan*

# Sinyal Perubahan SekBer Sintang

	Inisiasi	Membangun Fondasi	Visi Bersama	Struktur	Transformasi
 <b>Kepemimpinan</b>	Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), pembentukan SekBer	Para pemangku kepentingan mendiskusikan isu-isu selama Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan pertemuan-pertemuan. Pemutakhiran RPJMD 2021-2025.	Sintang memiliki rencana aksi tentang Sintang Berkelanjutan, Kelapa Sawit Berkelanjutan, dan Rencana Aksi Bersama. Sintang juga mengembangkan MoU untuk meningkatkan kemitraan antara para pemangku kepentingan untuk Rimba Gupung	SekBer memiliki struktur organisasi dan peran yang jelas, yang dinyatakan dalam Surat Keputusan Bupati.	Komponen belum dikembangkan
 <b>Kolaborasi</b>	Para pemangku kepentingan terlibat dalam dialog (Musrembang) untuk membahas rencana dan program yang sedang dikerjakan.	Terdapat konektivitas antar program yang dilaksanakan oleh berbagai pihak, melalui <i>unboxing day</i> , Peta Gotong Royong, dan RKPD.	Sintang memiliki rencana aksi tentang Sintang Berkelanjutan, Kelapa Sawit Berkelanjutan, dan rencana aksi kolektif. Sintang juga mengembangkan MoU untuk meningkatkan kemitraan antara para pemangku kepentingan untuk Rimba Gupung	SekBer terbuka untuk kolaborasi, contohnya seperti pengembangan dokumen dan aksi konservasi berbasis masyarakat	
 <b>Tim Inti</b>	Pemangku kepentingan: Pemerintah, LSM/NGO, dan pemangku kepentingan swasta memiliki kepentingan untuk berkolaborasi dan berkontribusi dalam SekBer	SekBer memiliki struktur organisasi dan peran yang jelas, yang dinyatakan dalam Surat Keputusan Bupati.	SekBer bertindak sebagai jembatan komunikasi antar pihak, dan mampu memfasilitasi pertemuan	SekBer memiliki tim yang berdedikasi dan terlatih untuk mendukung pengelolaan data dan informasi, pembiayaan (penandaan anggaran hijau)	
 <b>Pengukuran Dampak</b>	Pemangku kepentingan memahami pentingnya mengukur kemajuan	Target dan indikator untuk mengukur kemajuan tersedia dalam rencana aksi	Sekber belum memiliki mekanisme untuk berbagi data	SekBer memiliki situs web khusus untuk menampilkan inisiatif yang didukung oleh para pemangku kepentingan.	
 <b>Institusi Kelembagaan</b>	Fungsi dan urgensi dari forum pemangku kepentingan telah dipahami bersama.	Pemerintah Kabupaten mendukung pembentukan forum multipihak (Peraturan Bupati No.41)	SekBer dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati	Struktur organisasi dan peran tercantum dalam SK Bupati, namun implementasinya masih perlu dioptimalkan	

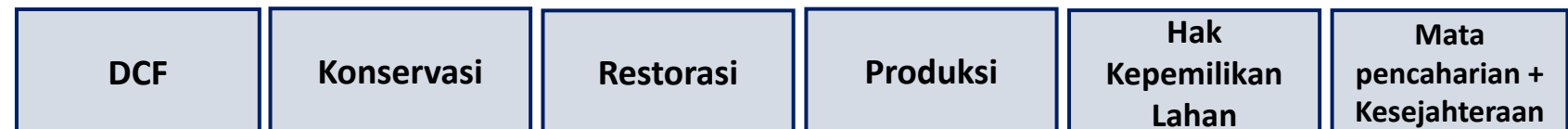
# Poin-Poin Penting Rencana Aksi



Rencana Aksi	Temuan Utama/Kunci
Komitmen dan kemajuan keberlanjutan di tingkat kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tata Kelola Kolaboratif Kabupaten Sintang</b> : Pemerintah Kabupaten Sintang telah meluncurkan peraturan untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan mitra pembangunan. Kerangka kerja ini menyelaraskan tujuan mitra dengan prioritas kabupaten, mendukung pembagian data, dan mengarusutamakan kegiatan kolaboratif. Peraturan ini juga mendefinisikan peran SekBer (MSF) dan menguraikan mekanisme pendanaan.</li> <li>• <b>Kemajuan Spesifik Kelapa Sawit</b> : Sintang sedang memulai Tahap 2 dari RAD KSB yang dipimpin oleh Tim Pelaksana Daerah (TPD). Peraturan Bupati (Perbup) untuk Fase 2 akan diluncurkan pada akhir tahun 2024. Fase 2 ini akan melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan dalam pelaksanaannya.</li> <li>• Melalui RAD KSB tahap 1, beberapa kolaborasi telah dilakukan;               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tiga perusahaan di Sintang sedang melakukan uji coba pemetaan dan registrasi STDB untuk pekebun swadaya. Pemerintah juga mendorong perusahaan untuk membentuk lembaga pengelolaan sumber daya &amp; pelatihan di tingkat desa.</li> </ul> </li> <li>• Pemerintah kabupaten saat ini sedang menyusun Perbup tentang kemitraan NKT untuk mendorong pengelolaan dan pemantauan berbasis masyarakat. Rimba Gupung (yang mengacu pada kawasan perlindungan lokal di dalam APL (kawasan non-hutan)) dapat dimasukkan ke dalam kemitraan tersebut.</li> <li>• Untuk meningkatkan ketertelusuran dan kepatuhan terhadap EUDR, Pemerintah bermitra dengan WWF Indonesia mengujicobakan sistem Hamurni, yang akan berkontribusi dalam memperkuat upaya kabupaten menuju praktik-praktik berkelanjutan dan menanggulangi deforestasi.</li> <li>• Peta jalan dan rencana aksi di tingkat kabupaten dan inisiatif telah tersedia dan telah mulai diimplementasikan. Sebuah data dasar telah ditetapkan, didukung oleh kerangka kerja peraturan yang mendorong kolaborasi di antara para pemangku kepentingan. Meskipun kemajuan telah dicapai, dukungan tambahan masih diperlukan untuk mencapai target dan tujuan yang telah ditetapkan.</li> </ul>
Target dan kemajuan inisiatif lanskap yang didanai oleh sektor swasta	
Peta jalan: Rencana aksi, di tingkat kabupaten dan inisiatif, untuk memenuhi target	

- Tercapai*
- Berproses*
- Tahap Awal*

*Slide berikut ini untuk melihat analisis target dan kemajuan kabupaten, termasuk kaitan dengan inisiatif yang didanai perusahaan, terhadap tema-tema utama*



# Rencana Aksi & Kemajuan Sintang

Target	Konservasi		Restorasi
	Perusahaan harus menetapkan setidaknya 7% dari konsesi mereka sebagai kawasan NKT	Mempertahankan zonasi penggunaan lahan di 59% hutan lindung & produksi, dengan setidaknya 75% berhutan	Dari tahun 2016 hingga 2020, degradasi terjadi pada tiga jenis ekosistem alami, dengan total luas 4.775,60 hektar.
<b>Pihak yang menetapkan target dan membantu mencapai target</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kebijakan kabupaten Kalimantan Barat</li> <li>Dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan, RA, WWF, dan Kalimantan Forest</li> </ul>	Pemerintah Kabupaten Sintang, WWF, RA	Lahan terdegradasi yang diidentifikasi oleh RA dalam laporan Landscale
<b>Kemajuan pencapaian target</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5% dari total 45 perusahaan perkebunan telah mengalokasikan kawasan konservasi.</li> <li>Kawasan NKT yang teridentifikasi seluas 162.763,73 Ha dari 905.004,88 Ha di Zona Penggunaan Lain.</li> <li>Penerbitan peraturan No. 49/2023 tentang prosedur dan mekanisme pengusulan dan penetapan kawasan konservasi di dalam dan di sekitar konsesi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pada tahun 2020 - 2022, Sintang mengalami deforestasi seluas 13.468,23 hektar.</li> <li>Sintang mengeluarkan peraturan No. 70/2023 tentang pemetaan indikatif dan pengelolaan NKT dan SKT di area penggunaan lain (APL)</li> <li>Untuk ketelusuran kelapa sawit, belum banyak inisiatif yang dilakukan di Sintang</li> </ul>	7.381,41 hektar telah direstorasi antara tahun 2016 - 2021.
<b>Sumber pendanaan untuk mendukung target</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sektor swasta untuk rencana aksi saat ini</li> <li>Pendanaan tambahan yang diperlukan untuk tim pemantau dengan opsi untuk kawasan konservasi baik di dalam, maupun di luar konsesi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terdapat kesenjangan pendanaan dalam upaya penelusuran.</li> <li>Kurangnya mitra pembangunan yang mendukung penelusuran untuk mengantisipasi EUDR di Sintang</li> </ul>	Tidak ada kesenjangan pendanaan yang teridentifikasi. Diperlukan identifikasi lebih lanjut.

# Rencana Aksi & Kemajuan Sintang

Target	Produksi		Hak Kepemilikan Lahan (STDB)	Dukungan terhadap Petani Kecil dan Mata-pencaharian
	45 Perusahaan Perkebunan memperoleh ISPO pada tahun 2025	Di tingkat nasional, tingkat produksi ISH: 4 ton per bulan/hektar.	Sintang menargetkan 2000 STDB diterbitkan pada tahun 2018 - 2023	Petani swadaya tersertifikasi ISPO pada tahun 2027
<b>Pihak yang menetapkan target dan membantu mencapai target</b>	Dinas Perkebunan (Disbun) Kabupaten Sintang.		<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Perkebunan Sintang, TPD RAD KSB, RA, WWF Solidaridad, USAID Segar.</li> </ul>	Dinas Perkebunan (Disbun) Kabupaten Sintang.
<b>Kemajuan pencapaian target</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>14 dari 45 perusahaan telah tersertifikasi ISPO.</li> </ul>	Produksi rata-rata petani swadaya adalah 2,2 ton per bulan/hektar.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menargetkan 800 OP petani swadaya memperoleh STDB pada tahun 2024.</li> <li>Kemajuan: 180 petani telah memiliki STDB.</li> <li>1.454 petani (~3.264 ha) menerima dukungan LSM/NGO.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dua koperasi memperoleh sertifikasi RSPO.</li> <li>Tiga koperasi dalam proses untuk mendapatkan sertifikasi ISPO.</li> </ul>
<b>Sumber pendanaan untuk mendukung target</b>	Perusahaan harus lebih proaktif untuk mendapatkan ISPO karena sifatnya yang wajib	Pendanaan yang dibutuhkan untuk: <ul style="list-style-type: none"> <li>Rencana Induk Perkebunan terintegrasi dengan Rencana Tata Ruang, dengan alokasi lahan yang dibutuhkan untuk petani kecil.</li> <li>Pengembangan bisnis kelapa sawit didukung melalui BUMDES, bermitra dengan koperasi</li> </ul>	Belum ada kontribusi perusahaan; diperlukan kolaborasi antara perusahaan dan petani. Petani plasma juga harus terdaftar.	Sumber daya yang dibutuhkan untuk: <ul style="list-style-type: none"> <li>Memperkuat kemitraan perkebunan-koperasi: Peningkatan kapasitas untuk SH, pengumpulan data SH, pemetaan perkebunan, dan pembentukan aliansi SH.</li> <li>Diversifikasi program kemitraan di tingkat bisnis</li> </ul>

# Rencana Aksi & Kemajuan Sintang



Target	Hak-Hak Pekerja	Manfaat dan mata pencaharian masyarakat secara umum	
	Meningkatkan perlindungan terhadap pekerja	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (P2EMAS)	Target Per Kapita: Rp 34.000.000/tahun
<b>Pihak yang menetapkan target dan membantu mencapai target</b>	Departemen Ketenagakerjaan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Sintang	
<b>Kemajuan pencapaian target</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 44 dari 45 perusahaan membayar upah sesuai dengan Upah Minimum Regional (UMR).</li> <li>• 17 perusahaan telah membentuk Lembaga Kerja Sama Bipartit.</li> </ul>	Terdapat Program Ekonomi berkelanjutan yang bertujuan untuk mendiversifikasi sumber pendapatan guna mengurangi ketergantungan masyarakat adat dan lokal terhadap kelapa sawit dan karet. Program ini telah dilaksanakan di 14 desa.	<p>PDB per kapita, per: Rp 32,53 juta/tahun dengan sektor utama pertanian.</p> <p>Target spesifik untuk komoditas untuk petani swadaya: Karet 5.000 Ha, Kelapa Sawit 2.000 Ha, Lada 900 Ha, Kopi 300 Ha, Kakao 300 Ha.</p>
<b>Sumber pendanaan untuk mendukung target</b>	Pendanaan yang dibutuhkan untuk mengatasi anggaran penjangkauan yang terbatas. Kolaborasi antara pemerintah, OMS, dan perusahaan sangat penting untuk penjangkauan hukum hak-hak pekerja yang efektif.	Pendanaan: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pendanaan yang dibutuhkan untuk memperluas program ke desa-desa lain	Untuk pekebun swadaya, saat ini, pendanaan berasal dari dukungan investasi (keuangan, akses pasar, pelatihan) yang sedang berlangsung melalui kemitraan (misal: Koperasi Rimba Harapan).

# Poin-Poin Penting Pemantauan & Pelaporan



Pemantauan & Pelaporan
Pengumpulan, Pengelolaan, dan Pemantauan Data
Pelaporan dan Validasi
Penggunaan data dan platform yurisdiksi yang terintegrasi

- Tercapai*
- Berproses*
- Tahap Awal*

## Temuan Utama/Kunci

Selain dokumen pelaporan dan pemantauan wajib seperti evaluasi kinerja tahunan, laporan kinerja pengelolaan lingkungan, dan evaluasi pelaksanaan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), Kabupaten Sintang telah mengadopsi berbagai kerangka kerja untuk pengukuran dan pelaporan kolaboratif:

1. Kerangka Daya Saing Daerah (KDSD)
2. Indikator Yurisdiksi Berkelanjutan (IYB);
3. LandScale
4. Proyek Keterbukaan Karbon (CDP)

Kerangka kerja ini secara umum mencakup empat tema keberlanjutan: ekosistem/lingkungan, kesejahteraan manusia/sosial, ekonomi dan produksi, dan tata kelola.

Sintang juga menerapkan kebijakan Satu Data Indonesia untuk meningkatkan tata kelola data dan mendorong pembangunan berbasis data. Terdapat peraturan dan rencana aksi serta standarisasi, integrasi, dan aksesibilitas data melalui platform digital yang saling terhubung. Data yang terkumpul disimpan dan distandarisasi:

- One Data Portal (<https://data.sintang.go.id/>) bertujuan untuk mengintegrasikan data yang terkumpul dalam bentuk statistik dan tabel - masih dalam tahap pengembangan
- One Geoportal (<https://sintangkab.ina-sdi.or.id/>) : informasi dan data spasial
- WebGIS SekBer (<https://www.sekbersintang.petaku.online/>) : data geospasial dari pelaksana lanskap dan mitra




# Poin-Poin Penting Pendanaan & Strategi



## Pendanaan & Strategi

Sumber dan mekanisme pendanaan

Kesenjangan pendanaan untuk mencapai tujuan dan target

-  *Tercapai*
-  *Berproses*
-  *Tahap Awal*

## Temuan Utama/Kunci

- Inisiatif lanskap di Sintang didanai oleh anggaran pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil.
- Pemerintah telah mulai melakukan penandaan anggaran, untuk memantau pembiayaan terhadap target.
- Mekanisme pendanaan untuk kegiatan multipihak yang ada saat ini belum ditetapkan secara formal. Selain itu, belum ada sistem pendanaan yang memungkinkan proses pencairan dana yang aman dan berkelanjutan.
- Optimalisasi sumber daya dan strategi pendanaan dapat ditingkatkan untuk mengatasi keterbatasan pendanaan saat ini dan memastikan keberlanjutan inisiatif.
- Legalisasi Status Hukum SekBer dapat memungkinkan SekBer untuk menerima dan mengelola dukungan keuangan secara efektif untuk inisiatif multipihak.

# 6. Pembelajaran dan Rekomendasi



# Kematangan di tiga kabupaten percontohan dan inisiatif



Forum Multi Pihak & Tata Kelola	Rencana Aksi	Pemantauan & Pelaporan	Pendanaan & Strategi
Kepemimpinan	Komitmen keberlanjutan di tingkat kabupaten dan kemajuan komitmen tersebut	Pengumpulan, pengelolaan, dan pemantauan data	Sumber dan mekanisme pendanaan
Aksi kolaboratif antar pihak	Target dan kemajuan inisiatif lanskap pembiayaan pihak swasta	Pelaporan dan validasi	Kesenjangan pendanaan untuk mencapai tujuan dan target
<i>Backbone Engagement</i> (Kekuatan/kemantapan keterlibatan)	Peta jalan: rencana aksi di tingkat lanskap dan inisiatif, untuk mencapai target	Berbagi data dan platform yurisdiksi terintegrasi	
Pengukuran, pembelajaran, dan evaluasi			
Tata kelola lembaga			

*Tercapai*
 *Berproses*
 *Tahap Awal*

# Poin Utama dari Forum Multi Pihak & Tata Kelola



## Pembelajaran Utama

- **Pembentukan forum multi-pihak yang formal:**
  - Setiap kabupaten contoh telah membentuk forum multi-pihak yang formal, seperti PUPL di Aceh Tamiang, TKSKH di Siak, dan SekBer di Sintang.
  - Disahkan oleh surat keputusan formal yang menguraikan tujuan, fungsi, struktur organisasi, dan peran pemangku kepentingan.
  - Menunjukkan komitmen terhadap kolaborasi terstruktur di antara berbagai pemangku kepentingan
- **Tantangan dalam koordinasi dan komunikasi:**
  - Kurangnya mekanisme komunikasi yang mapan, rutin untuk memastikan kolaborasi dan implementasi para pihak yang efektif.
  - Penciptaan ruang aman untuk menginisiasi transformasi kolaborasi para pihak.
  - Peta jalan/roadmap MSF merupakan komponen yang penting untuk optimalisasi peran MSF sebagai hub data, koordinasi, dan entry point untuk investasi di tingkat kabupaten.
- **Kekuatan dukungan dan kemitraan:**
  - Dukungan kuat dari pemerintah daerah, mitra dan sektor swasta sangat penting dalam memajukan upaya pembangunan berkelanjutan.
- **Peningkatan kapasitas dan perbaikan sistemik:**
  - Pentingnya peningkatan kapasitas, terutama dalam koordinasi dan perbaikan sistem yang berkelanjutan untuk memastikan keberhasilan jangka panjang dan keberlanjutan inisiatif lanskap.
  - Diperlukan sistem monitoring & evaluasi yang mumpuni dan dapat dijalankan.

# Poin Utama dari Rencana Aksi



## Pembelajaran Penting

- **Meresmikan/formalisasi dan mempublikasikan Rencana Aksi Lanskap:**
  - Siak dan Sintang telah meresmikan dan mempublikasikan rencana aksi lanskap dan juga menyelaraskannya dengan target nasional RAD-KSB.
  - RAD-KSB di Aceh Tamiang telah diresmikan namun belum dipublikasikan secara resmi, sehingga membatasi dampaknya yang lebih luas.
  - Formalisasi dan publikasi rencana aksi sangat penting untuk memastikan bahwa rencana aksi tersebut dapat diimplementasikan secara efektif dan dirujuk oleh para pemangku kepentingan.
- **Target dan Pemantauan yang Terukur:**
  - Rencana aksi ketiga kabupaten tersebut mencakup tujuan konservasi, restorasi, produksi dan mata pencaharian, termasuk petani swadaya, pemberdayaan perempuan, gender, dan hak-hak buruh.
  - Inisiatif yang didukung oleh pemerintah, donor, dan pihak swasta sering memiliki prioritas tujuan yang sama, namun indikator untuk menetapkan target dan memantau capaian belum selaras.
  - Target capaian dan pemantauan belum terukur. Kabupaten perlu menetapkan target bersama dan rencana aksi yang memiliki target yang jelas (KPI) bagi para pemangku kepentingan untuk mendukung pencapaian target.
  - Sebagai contoh, dokumen terpadu di tingkat kabupaten di Sintang dan Aceh Tamiang diperlukan untuk menyelaraskan target pemerintah dengan kontribusi dari mitra pembangunan.
- **Kerja kolaboratif dalam mencapai tujuan lanskap:**
  - Program Lanskap Siak Pelalawan (SPLP) dan Koalisi Private Sektor untuk Siak Hijau (KPSSH) menunjukkan kekuatan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan antara pemerintah, LSM, dan perusahaan untuk mencapai tujuan yang sama.
  - Terlepas dari keberhasilan inisiatif tersebut, sebuah peraturan atau kerangka kerja kolaboratif diperlukan untuk memperjelas peran dan tanggung jawab di antara para pemangku kepentingan, untuk memastikan koordinasi yang efektif.

# Analisis Prioritas Pemerintah dan Swasta



Tema	Contoh Target & Prioritas Pemerintah	Keselarasan dengan prioritas pihak swasta
Kepemilikan lahan	Registrasi STDB untuk petani swadaya, misal: Aceh Tamiang memiliki target 30% legalitas lahan untuk petani	Registrasi STDB untuk mendukung sertifikasi & legalitas EUDR, sumber yang berkelanjutan
Produksi	Sertifikasi ISPO untuk petani & PKS, serta peningkatan produksi. misal: Aceh Tamiang memiliki target peningkatan vol. kelapa sawit berkelanjutan 30%	Peningkatan sumber yang berkelanjutan melalui sertifikasi, peningkatan produksi, potensi hubungan ke Scope 3 GHG
Konservasi	Perlindungan NKT dan gambut. Misal: Perusahaan di Sintang harus mengalokasikan 7% area konsesi sbg area NKT	Tidak sepenuhnya selaras, tergantung tipe fungsi/penggunaan lahan dan jenis ekosistem
Kesejahteraan & mata pencaharian	Sertifikasi, diversifikasi, perlindungan pekerja, pelatihan untuk petani. Misal: Sintang memiliki target per-kapita 34juta/tahun	Target dan prioritas selaras, namun target tidak terlalu terjabarkan, potensi untuk mitigasi risiko isu HAM
Restorasi	Restorasi lahan dan gambut terdegradasi. Misal: Aceh Tamiang memiliki target 50% untuk meningkatkan fungsi ekosistem	Restorasi dan rehabilitasi ekosistem didukung oleh pemerintah & swasta, peluang untuk skala yang lebih luas & pendanaan program iklim
Iklim	Siak memiliki target pengurangan emisi GRK 30% dari baseline 2019	Swasta memiliki target pengurangan emisi, peluang pendanaan terkait hal ini
Bebas deforestasi & konversi (DCF)	Siak memiliki kebijakan untuk menghentikan pengembangan di lahan gambut (izin kehutanan di dalam area hutan & perkebunan di APL)	Program pemerintah mendukung DCF, namun tidak menyeluruh dan terbatas untuk beberapa tipe fungsi/penggunaan lahan

Keselarasan prioritas pemerintah & swasta

# Poin Utama dari Pemantauan dan Pelaporan (1)



## Pembelajaran Penting

- **Peningkatan pengumpulan dan standardisasi data:**
  - Ketiga kabupaten berada pada tahap yang berbeda dalam mengimplementasikan sistem pengumpulan data, tetapi tidak ada yang memiliki kerangka kerja yang terstandarisasi untuk pemantauan dan pelaporan.
  - Di Aceh Tamiang, alat yang digunakan untuk pengumpulan data masih sangat sederhana dan sangat bergantung pada input manual.
  - Pemantauan di Siak yang melibatkan berbagai mekanisme, tetapi belum ada validasi data.
  - Sintang, meskipun telah mengadopsi sistem yang lebih kuat dengan kebijakan Satu Data Indonesia dan berbagai platform untuk integrasi data, masih menghadapi tantangan dalam hal standardisasi dan aksesibilitas.
- **Integrasi dan aksesibilitas data antar pemangku kepentingan:**
  - Siak dan Sintang telah mengambil langkah-langkah untuk mengintegrasikan data antar pemangku kepentingan. Idaman Siak Pelalawan, memungkinkan para pemangku kepentingan untuk melacak kemajuan Program Lanskap Siak Pelalawan, dan Sintang memiliki platform seperti One Data Portal dan One Geoportal untuk meningkatkan tata kelola data.
  - Aksesibilitas dan integrasi data merupakan kunci untuk memastikan bahwa semua pihak terkait, termasuk pemerintah, perusahaan, dan masyarakat, dapat berkontribusi dan mendapatkan manfaat dari pengambilan keputusan berbasis data.

# Poin Utama dari Pemantauan dan Pelaporan (2)



## Pembelajaran Penting

- **Tantangan koordinasi dalam pemantauan berbagai Inisiatif:**
  - Meskipun ada upaya untuk mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi melalui TKSKH di Siak, berbagai mekanisme untuk memantau berbagai inisiatif yang berbeda menimbulkan tantangan.
  - Di Aceh Tamiang, pemantauan masih berada pada tahap awal, dan kesenjangan koordinasi dapat mempengaruhi konsistensi data dan kemampuan untuk melacak kemajuan.
  - Hal ini menunjukkan pentingnya membangun proses koordinasi yang terpadu dan efisien untuk memantau berbagai inisiatif guna peningkatan efektivitas kebijakan berbasis data.
- **Pembangunan kapasitas untuk analisis dan pelaporan data:**
  - Kapasitas analisis dan pelaporan data masih perlu ditingkatkan. Terdapat kebutuhan untuk berinvestasi pada sumber daya manusia untuk meningkatkan kemampuan PUPL dalam menganalisis data dan mengukur dampak secara efektif.
  - Meskipun berbagai alat pelaporan telah tersedia di Sintang, pengembangan dan integrasi platform digital yang sedang berlangsung akan membutuhkan investasi sumber daya manusia untuk memastikan bahwa sistem ini dapat digunakan sepenuhnya.
  - Membangun kapasitas untuk analisis data, pengukuran dampak, dan pelaporan sangat penting untuk memajukan upaya keberlanjutan dan memastikan bahwa data yang dikumpulkan digunakan secara efektif untuk mendorong perbaikan berkelanjutan.

# Poin Utama dari Pembiayaan dan Strategi



## Pembelajaran Penting

- **Mekanisme pendanaan dalam memenuhi target bersama:**
  - Ketiga kabupaten menghadapi tantangan terkait mekanisme pendanaan dalam memenuhi target lanskap. Di Aceh Tamiang, belum ada mekanisme yang jelas untuk mengelola berbagai sumber pendanaan lanskap. Siak juga tidak memiliki skema pendanaan bersama untuk inisiatif bentang alamnya, para pihak beroperasi secara independen. Di Sintang, meskipun terdapat penandaan anggaran, sistem pendanaan untuk kegiatan multipihak belum terbentuk secara formal.
  - Hal ini menjelaskan perlunya membangun mekanisme pendanaan yang formal dan terkoordinasi untuk mendukung keberlanjutan jangka panjang.
- **Perlunya kedudukan hukum dan kerangka kerja kelembagaan yang jelas:**
  - Aceh Tamiang dan Sintang menghadapi tantangan terkait status hukum badan pengelola lanskap mereka. PUPL belum berbadan hukum, sehingga membatasi kemampuannya untuk mengelola dan menerima pendanaan secara efektif. SekBer Sintang juga belum memiliki status hukum formal, yang menghambat kapasitasnya untuk mengelola dukungan keuangan untuk inisiatif multi-pihak.
  - Kepemilikan status hukum yang jelas untuk MSF cukup penting untuk memastikan MSF dapat secara efektif mengelola dan mengalokasikan sumber daya untuk inisiatif yang mereka fasilitasi dan pantau.
- **Optimalisasi Sumber Daya dan Strategi Pendanaan Berkelanjutan:**
  - Keterbatasan pendanaan dengan jangka waktu yang panjang menghambat keberlanjutan inisiatif lanskap. Kurangnya mekanisme pendanaan yang aman dan berkelanjutan merupakan masalah yang umum terjadi.
  - Untuk mengatasi tantangan ini, sangat penting untuk mengembangkan strategi yang kuat di tingkat lanskap untuk optimalisasi sumber daya, mengamankan pendanaan jangka panjang, memperbanyak keberagaman sumber pendanaan, dan memastikan keberlanjutan pembiayaan.

# Usulan kegiatan bagi perusahaan hilir untuk mendukung inisiatif lanskap



Forum Multipihak & Tata Kelola Kelembagaan	Rencana Aksi	Pemantauan & Pelaporan	Pendanaan & Strategi
Mendorong mitra rantai pasok, terutama pemasok, dan inisiatif-inisiatif yang didanai oleh perusahaan untuk berpartisipasi dalam forum multipihak	<b>Mendorong inisiatif lanskap untuk mengembangkan target jangka panjang yang selaras dengan dan/atau mendukung tujuan tingkat kabupaten</b>	Mendanai pengembangan kapasitas untuk pengumpulan data, manajemen dan platform di tingkat kabupaten, termasuk pengumpulan data dasar sehingga kemajuan dapat ditunjukkan	<b>Mendorong pelaksana lanskap untuk mengembangkan strategi pendanaan yang beragam untuk mewujudkan rencana dan target aksi jangka panjang, termasuk estimasi mengenai kesenjangan pembiayaan terhadap target</b>
Melibatkan pemerintah, termasuk melalui forum multipihak, untuk mengkomunikasikan dukungan terhadap tujuan-tujuan yang selaras (misalnya konservasi, restorasi, registrasi STDB, dukungan bagi petani kecil)	<b>Mempertimbangkan komitmen pendanaan <i>multiyears</i> untuk melengkapi kebutuhan perencanaan aksi jangka panjang oleh inisiatif dan pemangku kepentingan lainnya</b>	<b>Menyelaraskan ekspektasi pelaporan dengan KPI dan platform pelaporan yang ditetapkan secara lokal</b>	Melibatkan mitra rantai pasok, donor, dan investor potensial untuk meningkatkan alternatif pendanaan tambahan bagi lanskap
<b>Mendukung peningkatan kapasitas Forum Multipihak, terutama untuk membangun kapasitas organisasi, kemampuan koordinasi, dan sistem data.</b>		Mendorong pelaksana lanskap untuk melaporkan target dan kemajuan secara terbuka, dan selaras dengan yurisdiksi	

# Kebutuhan Pendanaan & Peluang dalam Inisiatif Lanskap/Yurisdiksi

**Mill & Koneksi sawit/fibre besar**  
**Potensi dukungan in-kind:**  
 Program untuk petani swadaya, UMKM, dan value added processing lainnya

Dukungan untuk petani swadaya termasuk GAP, STDB, replanting  
**Pendanaan saat ini:**

- \$ Operasional sendiri + microfinance
- \$ Dukungan in-kind dari PKS/pabrik besar
- \$\$ Brand/retailer melalui IL/Y
- \$\$ RegAg atau proyek carbon/gambut
- \$\$ Microfinance untuk BMP dan/atau value added processing
- \$\$ Donor pemerintah (CPO fund)

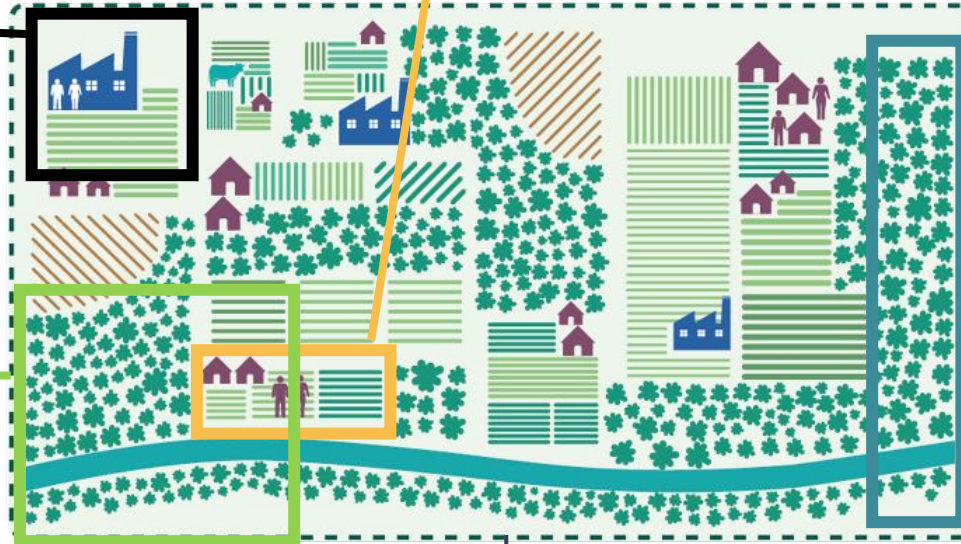
**Dukungan untuk kelompok masyarakat berbasis konservasi dan ekonomi berbasis alam**

**Pendanaan saat ini:**

- \$ Dana proyek karbon
- \$ Pendapatan dari kayu/HHBK
- \$\$ Brand/retailer melalui prog. lanskap
- \$\$ Donor

**Potensi pendanaan:**

- \$\$\$ PES, proyek karbon
- \$\$ Ekonomi berbasis alam/value added processing
- \$\$\$ Dana pemerintah misal: dana desa, REDD, dana obligasi



**Dukungan untuk area lindung yang dikelola pemerintah**

**Pendanaan saat ini:**

- \$ Dana pemerintah
- \$ Brand/retailer melalui prog. lanskap

**Potensi pendanaan:**

- \$\$\$ REDD+, Proyek karbon
- \$\$\$ Dana obligasi

**Forum Multi-stakeholder & Governance**

**Current funding:**

- \$ Pemerintah daerah

**Potensi pendanaan:**

- \$\$ Pemerintah pusat dan institusi finansial
- \$ Brand/retailer melalui prog. lanskap

